

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DAN STRATIFIKASI SOSIAL USAHA
PENANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN LOKAL DAN NELAYAN ANDON
DI PELABUHAN PERIKANANPANTAI (PPP) MAYANGAN KOTA
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

**OLEH :
SITI RUKIYAH ANGGRAENI
105080400111024**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2015

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DAN STRATIFIKASI SOSIAL USAHA
PENANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN LOKAL DAN NELAYAN ANDON
DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN KOTA
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

SKRIPSI

PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan

Di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Brawijaya

Oleh :

SITI RUKIYAH ANGGRAENI

NIM. 105080400111024



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DAN STRATIFIKASI SOSIAL USAHA
PENANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN LOKAL DAN NELAYAN ANDON
DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN KOTA
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

Oleh :
SITI RUKIYAH ANGGRAENI
NIM. 105080400111024

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 30 Juni 2015
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Dosen Penguji I

(Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP)
NIP. 19640228 198903 2 003
Tanggal:

Dosen Penguji II

(Zainal Abidin, S.Pi, MBA, MP)
NIP. 19770221 200212 1 008
Tanggal:

Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP. 19610417 19903 1 001
Tanggal:

Dosen Pembimbing II

(Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP)
NIP. 19750310 200501 2 001
Tanggal:

Mengetahui,
Ketua Jurusan SEPK

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP. 19610417 19903 1 001
Tanggal :

RINGKASAN

SITI RUKIYAH ANGGRAENI. Skripsi Analisis Sistem Bagi Hasil Dan Stratifikasi Sosial Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal Dan Nelayan Andon Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dibawah bimbingan **Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP.** dan **WAHYU HANDAYANI, S.Pi. MBA. MP.**

Dalam masyarakat nelayan, konsep sistem bagi hasil sangat variatif bergantung pada aspek sosial budaya, jenis perahu, dan kualitas alat tangkap yang di operasikan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil merupakan strategi adaptasi usaha nelayan menghadapi tantangan kondisi lingkungannya (Kusnadi, 2007). Dengan adanya sistem bagi hasil yang baik merupakan salah satu hal untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dalam masyarakat nelayan buruh karena ketimpangan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan andon di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, (2) Perkembangan usaha penangkapan ikan di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, (3) Stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat nelayan khususnya pada nelayan lokal di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukandi Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*). Sedangkan cara teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Sistem bagi hasil antara nelayan lokal dan nelayan andon yaitu pada pembagian antara juragan perahu (pemilik perahu) dan ABK. Pada nelayan lokal pembagian antara juragan perahu dan ABK dibagi menjadi dua yaitu 50%:50%. Sedangkan pada nelayan andon pembagian antara juragan perahu (pemilik perahu) dan ABK langsung dibagi menggunakan bagian-bagian. Hal tersebut karena perbedaan budaya antara nelayan lokal dan nelayan andon.

Secara umum pemilik perahu atau juragan darat di Desa Mayangan Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo khususnya pada nelayan lokal membebankan biaya operasional seperti terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaing, kepada ABK dengan cara ditanggung bersama-sama. Akibatnya terdapat dua pandangan yang berbeda, disini terlihat bahwa nelayan ABK mengandalkan besarnya hasil tangkapan yang diperoleh dalam sistem bagi hasil, sehingga nelayan ABK menyadari bahwa sistem bagi hasil sudah cukup adil bagi mereka. Karena pemilik perahu atau juragan perahu memberikan lawuhan atau "*nduk-ghinduk*" dari hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh pada saat melaut. Dan lawuhan tersebut bisa dijual pada bakul ikan di sekitar (TPI) Mayangan, sehingga nelayan ABK memperoleh pendapatan tambahan. Selain itu, nelayan ABK menyadari bahwa

modal usaha untuk melakukan penangkapan ikan membutuhkan biaya yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan atau pendapat dari pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK dalam sistem bagi hasil, sampai sekarang tidak ada konflik antara keduanya, karena mereka merasa saling ketergantungan satu sama lain dalam menjalankan usaha penangkapan ikan agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang maksimal.

Alasan nelayan andon datang ke perairan Mayangan adalah karena seringnya terjadi angin kencang terutama pada musim barat yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa, dan juga untuk berlindung, dan kejadian ini menjadi kebiasaan sehingga para nelayan andon tersebut mulai menjadikan PPP Mayangan sebagai salah satu pelabuhan pangkalan. Komoditas ikan di perairan Mayangan juga bernilai ekspor contohnya ikan Kakap (*Lutjanus*), Kerapu (*Epinephelus*), dan lain-lain. Adanya TPI sebagai sarana menjual ikan kepada tengkulak sehingga mempermudah pemasaran ikan hasil tangkapan.

Selain itu, karena kedatangan nelayan andon menyebabkan perekonomian di kawasan pantai Mayangan semakin maju. Karena banyaknya usaha penangkapan yang dilakukan dan hasil penangkapan yang cukup maksimal serta jumlah penduduk yang meningkat, maka menimbulkan terciptanya banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar kawasan pantai Mayangan.

Dalam pembagian kerja nelayan lokal dan nelayan andon mempunyai tugas masing-masing dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pembagian kerja yang sudah diterapkan oleh pemilik perahu (juragan perahu), sehingga dalam melaut menghasilkan hasil tangkapan yang maksimal, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam usaha penangkapan ikan di Desa Mayangan Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo, ada dua fungsi dari pembagian kerja nelayan lokal dan nelayan andon yaitu pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK (anak buah kapal).

Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan, yaitu dari segi kedudukan yang paling tinggi dari ABK adalah kedudukan pemilik perahu atau juragan perahu, karena pemilik perahu atau juragan perahu sebagai pemilik modal usaha dan alat-alat produksi dalam melakukan operasi penangkapan ikan, sehingga dari segi kekayaan pemilik perahu atau juragan perahu dalam pembagian hasil lebih besar dari ABK, dari segi hubungan sosial, yang terjadi pada masyarakat nelayandi Desa Mayangan tidak ada terjadinya konflik yang diakibatkan perbedaan kelas, sehingga hubungan sosial terjalin dengan baik dan melakukan kerjasama dalam usaha penangkapan ikan.

Saran yang diberikan dari hasil penelitian yaitu: (1) Perlu adanya informasi kepada investor dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Mayangan, (2) Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan, (3) Perlu adanya pengkajian Undang-Undang tentang Sistem Bagi Hasil nelayan oleh pemerintah karena Undang-Undang tersebut pada kenyataannya tidak dapat diterapkan oleh masyarakat nelayan, karena Undang-Undang yang ada masih belum bisa menciptakan keadilan bagi nelayan, (4) Perlu adanya pengawasan dalam mengawal hasil tangkapan nelayan pada saat pembongkaran ikan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), supaya tidak terjadi pengambilan ikan secara berlebihan.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.



Malang, Juni 2015

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Laporan Skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan Salam tetap terhaturkan Kepada Baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti.

Didalam Laporan Skripsi ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai sistem bagi hasil antara nelayan lokal dan nelayan andon, dimana hal ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang.

Malang, Juni 2015

Penulis



UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan laporan ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- Kedua orang tua penulis, Ayah Moch. Jakfar Abd Ghani dan Ibu Fadilah yang sudah memberikan dukungan moral, materi dan spiritual.
- Bapak Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP dan Ibu Wahyu Handayani, S.Pi. MBA. MP selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan waktu hingga selesainya laporan ini.
- Bapak Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Bapak Zainal Abidin, S.Pi, MBA, MP selaku Dosen Penguji, yang telah bersedia menguji, memberikan keritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini.
- Bapak Ir. Moh Gunawan selaku Kepala UPT Pelabuhan Mayangan, Bapak Murdjito, S. Sos, MM selaku Kasubag Tata Usaha, Bapak Nonot Widjajanto selaku Kepala Syahbandar UPT Pelabuhan Mayangan, dan karyawan UPT Pelabuhan Mayangan
- Buat mbak ku Rosari Indah Hayati, Kakak Iparku Zulfikarrahman dan Keponaanku Tiara Zelsa Salsabila yang selalu memberikan semangat selama proses mengerjakan skripsi ini
- Kos Bungan Merak 1 Kav 20, Tri Wahyuni, Conchita, Lia Yusti, Conisely, Nyimas Iska, Kumala, terimakasih banyak buat semuanya
- Serta sahabat-sahabatku Niken, Presica, Mbak Manda, Yunita, dan Temen-temen Sosek 2010 terimakasih semua kritik, saran, dan waktunya.
- Adek-adekku Sosek 2011dek Irma, mentari, alief, rania terimakasih suport kalian sertasemua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu terimakasih semuanya.

Penulis sangat menyadari ada kekurangan dalam penulisan laporan ini, oleh karena itu penulis mohon adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Pengertian Nelayan	13
2.1.2 Nelayan Lokal	14
2.1.3 Nelayan Andon	15
2.2 Sistem Bagi Hasil	16
2.2.1 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan	18
2.2.2 Kebijakan Pembagian Hasil Usaha	21
2.3 Sosial Masyarakat Nelayan	22
2.3.1 Karakteristik Masyarakat Nelayan	22
2.3.2 Stratifikasi (kelas) Sosial	25
2.3.2.1 Pelapisan Sosial Dalam Masyarakat	26
2.3.2.2 Pelapisan Sosial Masyarakat Nelayan	27
2.4 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja	29
2.5 Potensi Konflik dari Sistem Bagi Hasil	30
2.5.1 Keadilan Sistem Bagi Hasil	31
2.5.2 Peredam Potensi Konflik	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.2 Pendekatan Penelitian	33
3.3 Teknik Pengambilan Informan	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	38

3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Batasan Penelitian	43
3.7 Analisa Data.....	43
3.8 Kerangka Pemikiran.....	48

BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Letak Geografis dan Topografis Desa Mayangan.....	50
4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Mayangan	51
4.1.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....	51
4.1.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	52
4.1.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	53
4.1.2.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
4.1.2.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	55
4.2 Karakteristik Fisik Kawasan PPP Mayangan	57
4.2.1 Sejarah Berdirinya PPP Mayangan	57
4.2.2 Fasilitas Yang Disediakan Oleh PPP Mayangan	59
4.2.3 TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	63
4.3 Sistem Bagi Hasil.....	65
4.3.1 Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan Usaha Penangkapan Ikan	65
4.3.1.1 Struktur Organisasi dan pembagian kerja Pada Nelayan Lokal	66
4.3.1.2 Struktur Organisasi dan pembagian kerja Pada Nelayan Andon	68
4.3.2 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan	71
4.3.3 Bagi Hasil Usaha Penangkapan Nelayan Lokal dan Nelayan Andon.....	76
4.4 Perkembangan Usaha Penangkapan.....	85
4.4.1 Perkembangan Produksi Perikanan	87
4.4.2 Musim Ikan.....	87
4.4.3 Perkembangan Alat Tangkap di Desa Mayangan.....	89
4.4.4 Produksi dan Nilai Produksi Ikan	92
4.5 Sosial Masyarakat Nelayan Desa Mayangan	96
4.5.1 Karakteristik Masyarakat Pesisir.....	96
4.5.2 Struktur Masyarakat Nelayan Desa Mayangan.....	98
4.5.3 Stratifikasi (kelas) Sosial	99
4.6 Potensi dan Pereda Konflik Dari Sistem Bagi Hasil Nelayan Lokal.....	102
4.6.1Potensi Konflik Dari Sistem Bagi Hasil Nelayan Lokal	102
4.6.2 Pereda Konflik Sistem Bagi Hasil Nelayan Lokal.....	103

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106

DAFTARPUSTAKA.....	108
---------------------------	------------

LAMPIRAN	111
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengambilan Data dari Informan	38
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	50
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	51
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	53
7. Fasilitas Pokok dan Penunjang Operasional PPP Mayangan 2014	57
8. Fasilitas Fungsional PPP Mayangan 2014	59
9. Pembagian Hasil Nelayan Lokal dan Nelayan Andon	79
10. Musim Penangkapan Nelayan Lokal dan Nelayan Andon	84
11. Data Armada Kapal Perikanan Yang Digunakan PPP Mayangan	85
12. Perbandingan Jumlah Armada Kapal Perikanan PPP Mayangan	86
13. Perbandingan Jumlah Alat Tangkap Ikan PPP Mayangan	87
14. Perbandingan Jumlah Hasil Produksi Tangkapan Ikan PPP Mayangan	89
15. Jumlah Ikan Yang Didaratkan di PPP Mayangan	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Perkembangan Usaha Penangkapan	46
2. Skema Stratifikasi Sosial	47
3. Skema Kerangka Berfikir	48
3. Kantor UPT PPP Mayangan	59
4. TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	64
5. Struktur Organisasi dan pembagian kerja pada Nelayan Lokal	66
6. Struktur Organisasi dan pembagian kerja pada Nelayan Andon	68
7. Proses Pendaratan Ikan Sampai Dengan Bagi Hasil Nelayan Lokal	76
8. Proses Pendaratan Ikan Sampai Dengan Bagi Hasil Nelayan Andon	79
9. Stratifikasi (Kelas) Sosial Nelayan di Mayangan	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Probolinggo	111
2. Lay Out Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan	112
3. Gambar Penelitian	113

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia sebagai Negara bahari (*archipelagic state*), mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 95' sampai dengan 141' BT dan di antara 60' LU dan 110' LS. Sedangkan luas wilayah perairan laut Indonesia tercatat mencapai kurang lebih 7,9 juta km² (termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia/ZEE). Kalau dihitung, panjang pantai yang mengelilingi seluruh kepulauan Nusantara tercatat kurang lebih 81.000 km, serta jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir terdapat lebih dari 40 juta orang. Berdasarkan data yang ada pada UNCLOS '82, luas wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan laut seluas 3,1 juta km², yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,8 juta km² dan wilayah laut seluas 0,3 juta km². Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang berada dalam ZEE yang telah diakui secara internasional, seluas 2,7 juta km². Berdasarkan luas wilayah lautnya Indonesia tercatat sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah dan konfigurasi pulau-pulau yang sangat unik dan strategis (Pramono, 2005).

Disamping itu ada juga zona tambahan Indonesia, yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Selain itu, ada juga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal, dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan), kewenangan untuk mengelola lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan2 lainnya. Indonesia sebagai negara tropis, kaya akan sumberdaya hayati, yang dinyatakan dengan tingkat keaneka-ragaman hayati yang tinggi. Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000

jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, terdiri dari: ikan pelagis besar (1,16 juta ton), pelagis kecil (3,6 juta ton), demersal (1,36 juta ton), udang penaeid (0,094 juta ton), lobster (0,004 juta ton) , cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan-ikan karang konsumsi (0,14 juta ton). Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan (JTB) sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi sumberdaya ikan ini tersebar di 9 (sembilan) wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (Lasabuda, 2013).

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka umumnya hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang, dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun. Pada periode waktu tertentu nelayan melaut karena angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. Nelayan terdiri dari nelayan lokal dan nelayan andon dimana nelayan lokal adalah nelayan yang menangkap ikan di daerahnya sendiri dan nelayan andon merupakan nelayan yang secara administrasi bukan penduduk suatu daerah/wilayah dimana penangkapan ikan dilakukan atau disebut juga nelayan pendatang (Laila, 2010).

Nelayan yang berpindah umumnya telah mempunyai pengalaman dan *feeling* tentang daerah yang bagaimana yang baik untuk di tempati. Dengan cara menyusur pantai para nelayan dapat memilih daerah yang baik dilihat dari segi sumberdaya perairan, keamanan laut dan perlindungan terhadap ombak dan angin, potensi sumberdaya pertanian di sekitarnya, keamanan berproduksi dan

kecocokan pemukiman dengan tersedianya air tawar bersih, hal inilah yang di kenal dengan nelayan “ANDON” (Ismadi, 2009 dalam Lestari, 2010).

Nelayan andon adalah mereka yang melakukan penangkapan ikan berpindah-pindah sementara dari satu lokasi penangkapan ke lokasi lain. Kelompok nelayan ini ada yang berasal dari pantai utara pindah sementara ke pantai selatan jawa dan begitu pula sebaliknya.

Untuk wilayah perairan di Jawa Timur telah diidentifikasi tiga tipe nelayan andon :

1. Nelayan Bugis dari Balikpapan atau Sulawesi yang datang pada waktu musim ikan yaitu pada bulan Maret-November untuk menangkap ikan.
2. Nelayan dari pulau-pulau sekitar Perairan Madura (Sapeken dan Kangean) yang datang pada bulan Agustus-Januari, untuk menangkap ikan-ikan terumbu karang.
3. Nelayan dari Pasuruan atau Banyuwangi yang datang pada bulan Juli-Oktobre untuk menangkap ikan-ikan pelagis dengan menggunakan alat tangkap dan pukot cincin (*purse seine*)

(Lestari,2010)

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterahkan masyarakat perikanan, khususnya nelayan sebagai pelaku utama dalam pembangunan perikanan. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam jebakan lingkaran kemiskinan. Menurut Kusnadi (2003) Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok,

yaitu: Pertama, faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain : (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh. Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain : (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas. Kondisi alam ini kerap kali disebut musim paceklik yaitu suatu musim dimana nelayan tidak beraktivitas sama sekali. Guna mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka umumnya mengutang pada juragan yakni pemilik kapal dan alat tangkap.

Dalam rangka program pembangunan perikanan tangkap, maka adanya jaminan kelestarian usaha perikanan tangkap merupakan salah satu persyaratan mutlak yang diperlukan untuk keberhasilan program tersebut. Keberlanjutan usaha perikanan tangkap hanya dapat diwujudkan melalui adanya keseimbangan dan ketidakadilan dalam perolehan hasil dan pendapatan masing-masing pelaku dan menjadi penyebab utama ketidaklestarian usaha perikanan tangkap dalam jangka panjang. Ketidakadilan dan ketidakpuasan yang terjadi antara nelayan pemilik kapal, nelayan pengelola, dan awak kapal selalu berujung pada konflik yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak. Kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha perikanan tangkap telah diantisipasi pemerintah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP No 16/1964).

Sebelum lahirnya UU bagi hasil perikanan hubungan bagi hasil pemilik perahu dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap diatur dalam hukum adat. Pengaturan tersebut umumnya tidak tertulis dan masing-masing daerah tidak sama, namun tidak jarang dengan pengaturan tersebut lebih menguntungkan pada mereka yang mempunyai kedudukan kuat yaitu pemilik perahu. Peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil perikanan menurut pasal 1 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, menurut perjanjian maka mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya, peraturan ini diadakan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan penggarap dan penggarap tambak (Khoirotul, 2004: hal 6).

Menurut Endang (2011: hal 153) nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan hak atau berkuasa atas kapal / perahu dan alat tangkap ikan yang di pergunakan untuk menangkap ikan, nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan atau membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.

Sistem Bagi Hasil dalam penangkapan ikan sangat berperan pula dalam menentukan tingkat pendapatan nelayan. Dalam sistem pembagian hasil penangkapan ikan pada umumnya diterapkan dengan sistem bagi hasil ini, nelayan pemilik (juragan) mendapatkan bagian hasil lebih banyak dari nelayan penggarap (ABK). Sebagai contoh di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, sistem bagi hasil disini (Mayangan) tidak setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan terdapat satu pemilik (juragan) kapal yang ikut dalam penangkapan ikan. Sedang yang lainnya adalah nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK). Dalam setiap kapal penangkapan ikan biasanya terdapat 8-10 ABK atau tergantung jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan. Dalam system bagi hasil penghasilan dibagi 50% untuk juragan darat dan 50% untuk ABK. Jika ABK merangkapatau menduduki posisi atau jabatan tertentu, misalnya sebagai nahkoda atau jurumudi, maka dia mendapatkan 2 bagian dibagi dalam bentuk uang setelah dipotong pinjaman, selain pembagian dalam bentuk bagi hasil ABK mendapat bagian atau jatah “wesewe”. “wesewe” ialah pembagian ikan untuk dibawa pulang sebagai lauk pauk. Namun dalam prakteknya “wesewe” ini oleh nelayan lebih banyak dijual dari pada dibawa pulang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari (Endang, 2011: hal 156).

Ketimpangan dalam sistem bagi hasil seperti ini nampaknya sudah menjadi tradisi atau budaya dan nampaknya kondisi seperti ini cenderung dilestarikan, nelayan pemilik modal atau pemilik (juragan) mendominasi para nelayan. Sementara nelayan penggarap (ABK) tidak mempunyai pilihan. Dalam arti karena keterbatasan modal dan *skill* yang dimiliki oleh nelayan. Disamping itu juga karena budaya atau sikap *entrepreneur* yang tidak dimiliki oleh nelayan sehingga mereka lebih suka menyediakan tenaga dan resiko nyawanya daripada kehilangan modal. Sedang bagi pemilik (juragan) karena mereka sebagai pemilik modal dengan resiko kehilangan modal maka untuk menghindari atau meminimalkan resiko ini mereka menerapkan sistem bagi hasil sebagaimana dijelaskan di atas, yang kecenderungan dengan segala upaya atau bentuk sistem bagi hasil untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita kadang dirasa kurang adil bagi nelayan (Endang, 2011: hal 157).

Kedatangan nelayan andon ke daerah Pantai Mayangan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan kegiatan penangkapan ikan karena menggunakan metode penangkapan yang hampir sama dengan nelayan lokal sehingga hasil tangkapan cukup banyak, hal ini menyebabkan banyaknya nelayan lokal yang terpengaruh untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memanfaatkan sumberdaya laut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan ramainya kegiatan penangkapan tersebut, maka aktifitas nelayan di Mayangan dalam kegiatan penangkapan yaitu dalam sistem bagi hasil dapat menimbulkan pandangan yang berbeda antara pelaku usaha perikanan tangkap. Melihat kenyataan yang terjadi maka dirasa perlu diteliti diantaranya perkembangan penangkapan ikan di perairan Mayangan, stratifikasi sosial masyarakat nelayan, dan

bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan andon maupun nelayan lokal secara adil.

Berawal dari beberapa hal yang melatar belakangi laporan penelitian ini, terlihat bahwa kedatangan nelayan andon di daerah pesisir Mayangan Probolinggo memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Masyarakat Mayangan karena dampak adanya usaha penangkapan ikan yang semakin meningkat, kelas sosial masyarakat nelayan serta adanya permasalahan yang muncul.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kondisi sistem pengupahan, bagi hasil dan penggajian yang tidak berasaskan pada prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan, awak kapal tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemupukan modal melalui simpanan yang disisihkan dari hasil yang di peroleh sehari-hari. Dengan demikian, seluruh pendapatan yang di perolehnya tidak memiliki kapasitas pemupukan modal dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan salah satu sifat usaha perikanan tangkap yang terkait dengan factor ketidakpastian hasil tangkapan, menyebabkan sistem upah dan penggajian sulit diterapkan terutama pada usaha perikanan skala kecil sulit bagi nelayan pemilik kapal untuk menjamin pengeluaran yang pasti seperti untuk membayar upah gaji secara tetap bagi nelayan pengelola atau ABK (Anak Buah Kapal).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil nelayan lokal dan nelayan andon di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
2. Bagaimana perkembangan usaha penangkapan ikan di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
3. Bagaimana stratifikasi social masyarakat nelayan di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan andon di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur.
2. Perkembangan usaha penangkapan ikan di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
3. Stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat nelayan khususnya pada nelayan lokal di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat menghasilkan suatu kontribusi kepada beberapa pihak yaitu:

1. Lembaga Akademis dan Peneliti

Untuk meneruskan ilmu pengetahuan yang telah di kembangkan melalui penelitian oleh mahasiswa di perguruan tinggi dan penambah wawasan keilmuan dan informasi tentang adanya dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan nelayan andon bagi nelayan lokal dan pengaruhnya terhadap aspek ekonomi masyarakat di wilayah Pesisir Mayangan dan untuk menambah ilmu tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah di bidang perikanan terutama mengenai masalah sistem bagi hasil dan potensi konflik yang ada di dalamnya, khususnya pada nelayan lokal di kawasan Perairan Mayangan serta sebagai salah satu bahan kajian untuk penelitian berikutnya.

2. Nelayan

Sebagai informasi baru tentang sistem bagi hasil nelayan lokal dan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat nelayan lokal dalam penerapan sistem bagi hasil dengan baik.

3. Pemerintah

Sebagai pertimbangan dalam pembangunan perikanan kawasan Mayangan khususnya dalam penentuan kebijakan tentang bagi hasil yang baik, agar kegiatan dalam bidang perikanan semakin maju.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya, yaitu tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Andon di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil penangkapan antara nelayan andon dan nelayan lokal baik menggunakan alat tangkap pancing dan Jaring di daerah pesisir pantai Sendang Biru perbedaannya adalah pada nelayan lokal pada umumnya menggunakan persentase, sedangkan pada nelayan andon menggunakan bagian, hal ini dikarenakan budaya pada masing-masing daerah. Pada umumnya, nelayan andon memiliki tingkat keberanian lebih tinggi dari pada nelayan lokal karena waktu yang diperlukan dalam kegiatan penangkapan lebih lama dan daerah penangkapannya lebih jauh daripada menggunakan armada payang. Saat ini, nelayan andon juga menggunakan layangan untuk memancing ikan besar seperti ikan Tuna. Dari kegiatan penangkapanyang dilakukan oleh nelayan andon dan nelayan lokal di perairan Sendang Biru, menghasilkan tangkapan ikan yang cukup banyak (Laila, 2010).

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap Pure Seine yang menggunakan alat bantu rumpon di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di wilayah pesisir Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek secara umum Nelayan pemilik membebankan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para Nelayan pandega dengan cara ditanggung bersama, karena pihak Nelayan pandega telah

banyak diuntungkan dari pendapatan uang lauk/lawuhan (bagian ikan pada setiap kesempatan operasi di laut yang diuangkan) dan uang insentif (hadiah pada hari raya atau saat hasil tangkapan melimpah). Disamping itu dalam pengambilan pinjaman kepada bakul sebesar 10% dan pembelian hasil tangkapannya dibawah standard yang dilakukan oleh bakul menurut nelayan pemilik merugikan usahanya, tetapi nelayan pemilik tetap melakukan kesepakatan ini untuk keberlangsungan dari usaha penangkapannya. Sistem ini dianggap sebagai budaya lokal yang memberikan imbal balik kepada bakul yang telah memberikan modal pembuatan rumpon (Priana, 2003).

Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan belum mampu menjadi pendorong terciptanya bagi hasil yang adil dalam masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pembagian kerja dalam penangkapan ikan dapat di spesialisasikan sesuai dengan kemampuan masing-masing dari tekong, juru mudi, tukang mesin, pangrabet kapal, pangrabet jarring, dan pandheganya di atas kapal. Disisi lain sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayancenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak pada kelompok borjuis atau parapemilik modal dan kurang menguntungkan bagi kelompok proletar atau nelayan buruh. Sedangkan sistem bagi hasil dalam penangkapan ikan untuk perahu besar (sleret, payang hitam dan jonggrang) berlaku sistem bagi tiga (telon), hasil tangkapan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: satu bagian untuk orenga dan dua bagian untuk pandhiga. Pada sistem telon, kerusakan dan kebutuhan peralatan perahu, payang dan kebutuhan bahan bakar besar atau kecil menjadi tanggungan orenga. Jadi, sistem bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan yakni

dari seluruh hasil penjualan diambil 15-20% oleh pemilik modal atau tengkulak sisanya dibagi 3 bagian, 1 bagian diambil sang pemilik perahu dan 2 bagian diberikan kepada buruh nelayan. Yang 2 bagian untuk buruh nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota nelayan yang ikut bekerja saat itu yang jumlahnya berkisar 20-25 orang. Untuk kapal kecil yang berjumlah 2 orang sistem bagi hasil yang berlaku adalah sistem bagi dua (*maron*), hasil tangkapan dibagi menjadi dua bagian, antara lain: satu bagian untuk orenga dan satu bagian lagi untuk pandhiga. Jika pemilik kapal tidak ikut melaut maka dia mendapatkan 2 bagian, yaitu 1 bagian sebagai pemilik kapal dan 1 bagian sebagai penyedia perbekalan (Fanni, 2013).

2.1.1 Pengertian Nelayan

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 juncto UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Nelayan” dikatakan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan, “Nelayan Kecil” adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Nelayan kecil menangkap ikan sebatas untuk konsumsi rumah-tangga, yang berarti memenuhi kebutuhan ikan sehari-hari. Nelayan, sementara itu, menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak dari yang dibutuhkannya sehari-hari. Dengan demikian, berarti ia menangkap ikan tidak sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri, tetapi juga kebutuhan sehari-hari orang lain, melainkan untuk dijual.

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli

mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian (Arifin, 2010*dalam* Laila,2010).

Nelayan didalam ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Sedangkan pengertian nelayan menurut Dirjen Perikanan, Departemen Pertanian (1988), yang disebut nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk di jual.

2.1.2 Nelayan Lokal

Nelayan lokal adalah penduduk asli yang secara administrasi merupakan penduduk suatu daerah/wilayah yang menempati wilayah pesisir dimana penangkapan ikan dilakukan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan sebagai mata pencaharian (Soekanto, 1988*dalam* Laila, 2010).

Apapun definisinya, keberadaan nelayan tersebut baik secara sendiri-sendiri (orang perorangan) maupun bersama-sama (korporasi) secara nasional berperan dalam mengkontribusi produk perikanan laut di Indonesia. Kontribusinya, terutama berasal dari sumberdaya ikan pelagis kecil. Namun demikian prinsip pengelolaan sumberdaya ikan secara terencana dan bertanggung jawab tetap menjadi acuan dalam pemanfaatannya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan (dimana nelayan memiliki hak akses), jika tidak ditata dan dikendalikan akan berpotensi menimbulkan konflik antara sesamanya (Arifin, 2010*dalam* Laila, 2010).

2.1.3 Nelayan Andon

Tidak ada definisi baku sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi, siapa sebenarnya nelayan andon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *andon* tidak ditemukan dan yang ada kata *endon*, *mengendon*, artinya *pergi dan tinggal beberapa waktu di suatu tempat*. Mungkin kata andon berasal dari bahasa daerah atau sebutan huruf vocal e menjadi a dalam berkomunikasi. Fakta empiris menunjukkan bahwa nelayan pendatang dan berpindah-pindah tempat umumnya disebut oleh nelayan lokal/masyarakat pesisir dengan nama nelayan *andon*. Jika demikian, maka takrif *nelayan andon* adalah nelayan yang secara administrasi bukan penduduk suatu daerah/wilayah dimana penangkapan ikan dilakukan, baik untuk kepentingan dirinya sendiri (orang perseorangan) dan atau bersama-sama keluarganya maupun kelompok (korporasi sesamanya atau bersama penduduk setempat/lokal) (Arifin, 2010 dalam Laila, 2010).

Nelayan andon adalah mereka yang melakukan penangkapan ikan berpindah-pindah sementara dari satu lokasi penangkapan ke lokasi lain. Kelompok nelayan ini ada yang berasal dari pantai utara pindah sementara ke pantai selatan jawa dan begitu pula sebaliknya. Migrasi nelayan andon selalu menimbulkan dampak (positif atau negatif) terhadap kehidupan sosial, baik langsung maupun tidak langsung pada masyarakat asli yang tinggal di daerah setempat. Masyarakat nelayan andon merupakan suatu arus migrasi nelayan pantai utara ke selatan jawa yang bersifat menetap musiman dan terjadi sepanjang tahun dalam jumlah yang cukup besar. Arus migrasi yang demikian akan memberikan dampak sosial yang besar pula, namun demikian apakah dampak itu dapat memberikan arti positif atau sebaliknya baik pada aspek sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang ada dan juga

tingkat keserasian antara masyarakat pendatang dan yang tinggal. Nelayan yang berpindah umumnya telah mempunyai pengalaman dan “feeling” tentang daerah yang bagaimana yang baik untuk di tempati. Dengan cara menyusur pantai para nelayan dapat memilih daerah yang baik dilihat dari segi sumberdaya perairan, keamanan laut dan perlindungan terhadap ombak dan angin, potensi sumberdaya pertanian di sekitarnya, keamanan berproduksi dan kecocokan pemukiman dengan tersedianya air tawar bersih, hal inilah yang di kenal dengan nelayan “ANDON” (Ismadi, 2009 dalam Lestari, 2010).

2.2 Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur pembagian hasil dari suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (*investor*) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. Atas masing-masing andil itulah, kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan itu dibagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha. Jika usaha itu berupa perikanan, maka yang disebut sebagai satu siklus usaha adalah sejak berangkat melaut sampai kedatangan nelayan dengan membawa hasil. Jika usahanya terus-menerus dan sulit ditentukan akhirnya, biasanya disepakati setiap satu bulan atau satu tahun. Namun tidak ada yang dapat memastikan bahwa usaha itu akan selalu untung. Untung atau

rugi, itu hal yang biasa dalam suatu usaha. Karena untung dibagi bersama, maka kerugian pun di bagi bersama pula, itulah letak keadilan dari sistem bagi hasil. Pemodal memiliki resiko kehilangan sebagian atau seluruh modalnya jika usahanya merugi. Sedangkan pengusaha menanggung rugi berupa kerja dan waktunya yang sama sekali tidak dibayar. Pengusaha tidak boleh mengambil gaji dari usaha itu. Ia hanya berhak atas pembagian untung. Jika pengusaha itu sudah mengambil sebagian modal untuk kebutuhan pribadinya (termasuk gaji), maka ia harus mengembalikannya ke pemodal. Begitu juga pengusaha tidak boleh menggunakan modal kerja yang diterimanya untuk dialihkan menjadi pembangunan sarana produksi (Siswanto, 2009).

Perjanjian bagi hasil menurut UU No. 16 tahun 1964 ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan.

Latar belakang perjanjian bagi hasil perikanan adalah :

1. Meningkatkan produktivitas
2. Meningkatkan Total Penerimaan (total *revenue*)
3. Tidak terjadi eksploitasi
4. Adanya Prinsip keadilan

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan tidak perlu ada bantuan dari kepala persekutuan hukum. Jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan untuk perikanan laut selama 2 kali musim atau 1 tahun berturut-turut (1 musim=6 bulan), untuk perikanan darat selama 6 kali musim atau 3 tahun berturut-turut. Bila waktu habis, dibuat perjanjian baru dan yang lama didahulukan. Perjanjian

dapat dikatakan sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola kapal.

Pada prinsipnya, ikan dan uang hasil penjualan ikan di bagi habis sesuai tugas dan tanggung jawab pemodal (juragan) dan pekerja (ABK/awak kapal). Pemodal memperoleh bagian atas resiko kehilangan modalnya, nelayan memperoleh bagian atas resiko kehilangan nyawanya. Dalam hubungan kerja, juragan darat secara formal berhubungan dan menjalankan kontrak kerja dengan juru mudi (juragan laut). Juru mudi memimpin awak kapal. Ia dibantu oleh sejumlah ABK (Anak Buah Kapal) yang dipilihnya sendiri. ABK berhubungan, menjalankan kerja dan bertanggung jawab kepada juru mudi. Juragan darat tidak ikut campur (Siswanto, 2009).

Nelayan memperoleh nafkah dari hasil penjualan ikan hasil tangkapannya. Bila dijual langsung ke pasar yang berjarak cukup jauh dari pelabuhan ataupun Pangkalan Pendaratan sulit untuk dilakukan karena memerlukan waktu lama. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, ikan dijual secara lelang. Saat ini hampir pada setiap Pelabuhan terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Wiyono, 2005).

2.2.1 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan

Bagi hasil perikanan tangkap terjadi karena adanya pemanfaatan faktor produksi dari dua sisi, pemilik modal dan faktor produksi yang lain yaitu tenaga kerja. Sistem bagi hasil dalam masyarakat nelayan dapat dibedakan menjadi dua. **Pertama**, adalah sistem bagi hasil **normatif nasional**, yaitu yang merujuk kepada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan yang disahkan oleh Pemerintah sejak tahun

1964. **Kedua**, sistem bagi hasil yang disebut **normatif lokal/akual**, yaitu aturan bagi hasil yang disepakati secara normatif oleh masyarakat nelayan, dan yang sebenarnya terjadi. Pada kenyataannya, undang-undang sistem bagi hasil normatif nasional tidak pernah diterapkan dalam masyarakat nelayan tradisional, justru sistem bagi hasil normatif lokal yang diterapkan.

1. Sistem bagi hasil normatif nasional

Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) Perikanan No.16 tahun 1964 yang telah disahkan bulan juli 964. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

- Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% dari hasil bersih untuk para nelayan pendega;
- Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40 % untuk para nelayan pendega;
- Mengenai hasil ikan liar: minimum 60 % dari hasil bersih untuk nelayan pendega.

Apabila diperjelas, maka makna dari ketentuan tersebut menyatakan, bahwa nelayan pendega (ABK) berhak sejumlah 75 % dari hasil tangkap (juragan : ABK = 25 : 75), sedangkan jika menggunakan motor perbandingan tersebut menjadi (juragan : ABK = 60 : 40). Ikan liar atau lebih dikenal ikan rucah adalah jenis ikan yang tertangkap selain dari tujuan penangkapan. Sebagai contoh, sasaran utama adalah ikan tongkol, kemudian ada jenis ikan selain tongkol yang tertangkap, maka yang 60 % menjadi hak ABK. Tetapi aturan ini akan sudah diterapkan apabila alat

tangkap yang digunakan mempunyai sasaran banyak jenis atau bermacam-macam spesies ikan.

2. Sistem bagi hasil normatif lokal

Sistem bagi hasil dalam usaha penangkapan boleh dikatakan telah melembaga di pedesaan pantai. Sistem bagi hasil ini berbeda untuk masing-masing alat tangkap. Upah kerja dari nelayan umumnya dikenal dengan sebutan bagian, yaitu bagian atas hasil tangkapan yang diperoleh dalam setiap trip. Besar upah kerja yang diperoleh anak buah kapal (ABK) bervariasi antara satu jenis alat tangkap dengan jenis alat tangkap yang lain. Upah kerja itu juga berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah lain, antara lain dipengaruhi oleh jumlah tenaga yang tersedia di daerah ataupun dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat nelayan setempat.

Didalam sistem bagi hasil sangat terkait dengan pola hubungan kerja yang terjadi. Pola hubungan kerja utamanya ditentukan pola penguasaan di darat dan penguasaan di laut. Penguasaan di darat lebih dikenal dengan juragan darat, adalah sebagai pemilik alat produksi. Penguasaan di laut juragan laut/nahkoda adalah orang yang ditunjuk pemilik untuk memimpin operasi penangkapan. Penunjukan terhadap nahkoda terutama didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan pengalamannya dalam mengoperasikan alat tangkap, sehingga persentase bagi hasil yang diterima nahkoda lebih besar dibandingkan dengan sesama ABK yang lain.

Sistem bagi hasil normatif lokal, dianggap lebih dapat berjalan sesuai dengan nilai, norma, dan tradisi turun-temurun masyarakat nelayan. Sekalipun demikian sistem bagi hasil setempat, tidak pula dapat memberikan tingkat kepuasan baik bagi nelayan pendega maupun nelayan pemilik.

Secara umum nelayan pemilik membebankan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para nelayan pendega dengan cara ditanggung bersama. Penanggungungan bersama ini lebih dikenal dengan bagi tengah. Resiko ini diperhitungkan dari hasil penangkapan setelah dilelang (potong biaya retribusi dan biaya angkut).

2.2.2 Kebijakan Pembagian Hasil Usaha

Kebijakan tentang hasil usaha perikanan khususnya perikanan laut terdapat dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan :

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:
 - a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% dari hasil bersih
 - b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih

Ayat (2) menyebutkan pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan dengan ketentuan bahwa

perbandingan antara bagian terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

- Pasal 4 menyebutkan, angka bagian fihak nelayan penggarap sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:
 - a. Beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan fihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan/biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut. Biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II seperti untuk koperasi, dan pembuatan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lain.
 - b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

2.3 Sosial Masyarakat Nelayan

2.3.1 Karakteristik Masyarakat Nelayan

Secara teologis masyarakat nelayan memiliki kepercayaan cukup kuat, bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan terjamin. Tradisi ini masih tetap dipertahankan, seperti tradisi *sowan suhu* bagi nelayan yang berasal dari Wonokerto Pekalongan. Tradisi ini dimaksudkan untuk menjaga

keselamatan para ABK (Anak Buah Kapal) dan Nahkoda pada waktu melaut dan memperoleh hasil penangkapan ikan yang banyak (Primyastanto, 2013).

Komunitas masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris yang berprofesi petani. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal maka nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan cenderung memiliki karakteristik khas, yakni, keras, tegas, dan terbuka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat pesisir khususnya nelayan sulit menerima perubahan karena mereka menganggap perubahan itu akan membawa pengaruh negatif bagi kehidupan mereka. Berdasarkan karakteristik human system dalam tipologi *fishery system* seperti yang dikemukakan oleh (Kusnadi, 2000 dalam Lestari, 2010) terdapat beberapa karakteristik umum dari nelayan yaitu:

- a. Nelayan berada menurut latar belakang sosial seperti tingkat umur, pendidikan, dan status sosial.
- b. Komunitas nelayan komersial, nelayan dapat bervariasi menurut *occupational commitment*nya seperti nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan, atau menurut *occupational pluralism*-nya seperti nelayan dengan sumber pendapatan beragam, dan lain sebagainya.
- c. Nelayan dapat bervariasi menurut motivasi dan perilaku dalam hal ini terdiri dari dua kelompok yaitu nelayan dengan karakteristik *profit-maximizers* yaitu nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan cenderung berperilaku seperti layaknya “perusahaan”,

dan kelompok nelayan satisficers atau nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.

Selain ditinjau berdasarkan karakteristik umum masyarakat nelayan juga dapat ditinjau berdasarkan pada tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional adalah nelayan yang dalam aktivitas-aktivitas penangkapan ikan menggunakan peralatan yang sangat sederhana, seperti: perahu, jukung, jaring sederhana dan pancing. Nelaya jenis ini beroperasi didaerah 0-3 mil laut garis pantai. Dengan peralatan sederhana, nelayan jenis ini hanya mengandalkan kemampuan seadanya untuk menangkap ikan dilaut. Sebagaimana kebanyakan nelayan tradisional, mata pencaharian mereka hanya mengandalkan jenis-jenis ikan yang tersebar tidak jauh dari pantai. Dengan demikian, memungkinkan terjadinya ketergantungan terhadap lingkungan di sekitar pantai, dan kelangsungan terhadap habitat ikan yang ada di pantai.

Dari beberapa sumber didapat kebanyakan nelayan tradisional didominasi oleh penduduk lokal yang tersebar dikawasan pantai Mayangan. Hal ini mengakibatkan kecenderungan untuk mengeksploitasi areal perikanan di wilayah yang tidak jauh dari domisili mereka.

2. Nelayan Semi Modern

Nelayan semi modern merupakan nelayan yang sudah mempunyai perlengkapan/peralatan alat tangkap, kapal dan sarana penunjang lainnya lebih

maju dibandingkan dengan nelayan tradisional. Nelayan ini sudah memperlengkapi kemampuan untuk menangkap ikan dengan peralatan seperti: kapal dengan mesin yang bertonase <10 GT, jaring dan peralatan navigasi (kompas). Areal penangkapan (*fishing ground*) mulai dari 3-6 mil dari garis pantai. Keberadaan nelayan semi modern memerlukan penanganan yang lebih intensif, mengingat adanya pola pikir sebagian dari mereka untuk merubah pola tradisional ke pola lebih modern akan berdampak bagi kemajuan nelayan di masa depan.

3. Nelayan Modern

Nelayan modern merupakan salah satu jenis nelayan yang sudah menggunakan teknologi modern dalam menangkap ikan di laut. Nelayan jenis ini banyak menggunakan alat-alat modern seperti: penentuan posisi GPS (*Global Positioning System*), pendekatan ikan, jaring gill net, bubu ikan, bubu lobster dan perbekalan yang lainnya. Dengan bertambahnya kemampuan teknologi, nelayan jenis ini mampu bertahan selama 3 bulan di tengah lautan. Areal penangkapan 6 mil ke atas dari garis pantai.

2.3.2 Stratifikasi (kelas) Sosial

Stratifikasi senantiasa terdapat dalam masyarakat (yaitu setiap masyarakat), yakni suatu sistem berlapis-lapis yang membagi warga-warga masyarakat dalam beberapa lapisan secara bertingkat. Suatu lapisan tertentu kedudukannya lebih tinggi dari lapisan lainnya. Masing-masing lapisan berisikan warga-warga masyarakat tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu pula. Kelompok warga masyarakat yang termasuk lapisan tertentu, disebut sebagai kelas sosial (Soekanto, 1988 dalam Laila, 2010). Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat akan tumbuh

selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya (Soekanto,1987*dalam* Laila, 2010).

Stratifikasi menurut Schoorl (1981), berarti proses atau struktur yang timbul dan di dalamnya keluarga (atau orang-orang) dibedakan antara yang satu dengan yang lain dan tersusun menjadi lapisan-lapisan yang berbeda menurut besarnya prestise dan atau kekayaan, dan atau kekuatan. Stratifikasi sosial (*social stratifikastion*) atau pelapisan sosial menurut Murniatmo(1983), merupakan kelompok manusia yang tinggal dalam kelompoknya (*group*) yang sama dan mempunyai kesamaan ciri-ciri kedudukan atau derajat, sehingga terjalin suatu hubungan intim diantara individu-individu sebagai anggota kelompok itu.

2.3.2.1 Pelapisan Sosial Dalam Masyarakat

Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat menurut (Soekanto, 1987) *dalam* Laila, 2010) dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, tetapi ada pula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pokok-pokok sebagai berikut dapat dijadikan pedoman untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan-lapisan dalam masyarakat:

1. Sistem stratifikasi sosial mungkinberpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan.
2. Sistem stratifikasi sosial dapat di analisa dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
 - Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju angka kejahatan), dan wewenang.

- Sistem pertetanggaan yang diciptakan warga-warga masyarakat (prestise dan penghargaan).
- Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapatkan berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang atau kekuasaan.
- Lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, dan keanggotaan pada suatu organisasi.
- Mudahnya bertukar kedudukan.
- Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.

Unsur-unsur yang mengikat suatu kelompok sosial bisa disebut sebagai pelapisan sosial, menurut Murniatmo (1983), disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Kesamaan ciri-ciri dalam kelompok sosial.
2. Kedudukan yang sama bagi anggota kelompok sosial.
3. Terjadinya hubungan yang intim di antara individu-individu sebagai anggota kelompok.

2.3.2.2 Pelapisan Sosial Masyarakat Nelayan

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kushadi (2002), pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi

dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. *Kedua*, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. *Ketiga*, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Masyarakat nelayan menurut Wahyuningsih dkk (1997), dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu:

1. Nelayan juragan, yang merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan juragan ada tiga macam yaitu nelayan juragan laut, nelayan juragan darat yang mengendalikan usahanya dari daratan, dan orang yang memiliki perahu, alat penangkap ikan dan uang tetapi bukan nelayan asli, yang disebut *tauke* (toke) atau jukong.
2. Nelayan pekerja, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan ini disebut juga nelayan penggarap atau *sawi* (awak perahu nelayan). Hubungan kerja antara nelayan ini berlaku perjanjian tidak tertulis yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Juragan dalam hal ini berkewajiban menyediakan bahan makanan dan

bahan bakar untuk keperluan operasi penangkapan ikan, dan bahan makanan untuk dapur keluarga yang ditinggalkan selama berlayar. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut peraturan tertentu yang berbeda-beda antara juragan yang satu dengan juragan lainnya, setelah dikurangi semua biaya operasi.

3. Nelayan kecil merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan alat penangkap ikan sederhana, karena itu disebut juga nelayan perorangan atau nelayan miskin. Nelayan ini tidak memiliki tanah untuk digarap pada waktu musim paceklik (angin barat). Nelayan ini sebagian besar tidak mempunyai modal kerja sendiri, tetapi meminjam dari pelepas uang dengan perjanjian tertentu. Nelayan yang umumnya memulai usahanya dari bawah, semakin lama meningkat menjadi nelayan juragan.

2.4 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

Menurut (Raho, 2003 *dalam* Hazairin, 2010), Pembagian kerja sebenarnya tidak jauh beda bila kita berbicara tentang fungsionalisme structural, dimana fungsionalisme structural adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Pokok persoalan dalam stratifikasi adalah bagaimana masyarakat memotivasi dan menempatkan orang-orang kedalam posisi-posisi yang tepat ke dalam stratifikasi. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni: pertama, bagaimana masyarakat membangkitkan dalam individu-individu

yang tertentu keinginan untuk menduduki posisi tertentu. Kedua, setelah orang itu menerima untuk menduduki posisi yang dirasa cocok, bagaimana masyarakat membangkitkan di dalam diri orang itu keinginan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh posisi itu atau bagaimana ia menjalankan tugas sesuai dengan posisinya itu dan agar posisi-posisi tersebut menarik untuk diduduki oleh orang yang tepat, maka masyarakat menyiapkan *reward* sehingga orang yang ditunjuk rajin dan berkomitmen lebih untuk menjalankan tugasnya.

2.5 Potensi Konflik dari Sistem Bagi Hasil

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang sejalan dan terjadi ketika tujuan dalam masyarakat tidak sejalan. Konflik dapat muncul karena adanya kesenjangan antara tujuan, perencanaan, dan fungsi antara berbagai pihak yang terkait. Akar permasalahan konflik ini sering berasosiasi dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan bio-fisik yang mempengaruhi kondisi lingkungan pesisir (Hikmah, 2008).

Beberapa ABK merasa bahwa upah yang mereka terima tidak sesuai dengan perkiraannya. Mereka merasa uang yang diterima lebih sedikit dari apa yang mereka perhitungkan. Masing-masing ABK tahu dengan pasti berapa bagian upah yang akan diterima sebab masing-masing jenis pekerjaantelah diketahui bagian yang akan diterimanya. Namun, konflik muncul karena masing-masing ABK tidak tahu dengan pasti pengeluaran untuk belanja perbekalan. Kadang-kadang pengeluaran untuk belanja perbekalan itu meningkat jumlahnya sehingga bagian upah bagi ABK akan berkurang. Pengurangan upah ini seringkali kurang dipahami ABK kecuali oleh

juragan atau majikan yang berwenang membeli perbekalan kapal (Sudaryanto, 2009).

2.5.1 Keadilan Sistem Bagi Hasil

Secara teoritis, pola yang diatur oleh pemerintah sangat bagus dan dapat menciptakan keadilan. Namun yang terjadi di lapang sangat berbeda, karena nelayan, khususnya nelayan pemilik lebih memilih sistem bagi hasil secara adat yang menguntungkan satu pihak. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, diantara yaitu: Pertama, ketidaktahuan masyarakat nelayan terhadap Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Ketiga, kekuatan adat kebiasaan. Keempat, kemampuan tenaga kerja. Kelima, adanya kelemahan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Pada Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tidak memperhatikan keseimbangan perbandingan bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap pada setiap alat tangkap yang berbeda (Solihin, 2008).

Pada umumnya cara pembagian hasil penangkapan ikan di laut melalui sistem bagi hasil yang dijalankan antara majikan dan buruh atau anak buah kapal (ABK) adalah 20% untuk ongkos perbekalan, sedangkan sisanya 80% akan dibagi dua antara majikan (40%) dan ABK (40%). Namun juga ada yang pembagiannya menggunakan sistem 4:6, maksudnya majikan 4 bagian dan ABK mendapatkan 6 bagian. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa : *"jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: jika dipergunakan perahu*

layar, minimum 75% dari hasil bersih sedangkan jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% dari hasil bersih” (Sudaryanto, 2009).

2.5.2 Peredam Potensi Konflik

Dengan memperhatikan aspek sosial-budaya dan kepentingan ekonomi masyarakat nelayan, pemikiran-pemikiran mengatasi konflik perebutan sumber daya perikanan laut tidak mudah dilaksanakan. Prinsip yang harus dikembangkan untuk menghindari konflik adalah strategi pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan pendekatan yang menyeluruh tentang jumlah biaya, keuntungan yang dicapai dari proses eksploitasi. Strategi harus memperhatikan interaksi positif antara kepentingan ekonomi dan lingkungan (Agusta, 2009).

Upaya penyelesaian (resolusi) perlu segera dilakukan terutama pada konflik yang bernuansa kekerasan agar tidak semakin buruk dan diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan baru di masyarakat. Di pihak lain, resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri suatu kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya (Hikmah, 2008).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan waktu pelaksanaan pada tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015.

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Sulistyo-basuki (2006:93) "metode penelitian merupakan cara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian." Adapun pengertian menurut Mardalis dalam Skripsi Renie Puji Astuti (2010) "metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian."

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

metode penelitian kuantitatif, yang menurut Sugiyono (2012:23) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2011).

Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai (*value free*). Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatif mereduksi sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bias itu maka penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya (Sudarwan Danim, 2002: 35).

Dalam penelitian tentang analisis sistem bagi hasil usaha penangkapan ikan antara nelayan lokal dan nelayan andon ini bersifat studi kasus (*case study*). Menurut Umar (1997), studi kasus merupakan penelitian yang terperinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya peneliti

berusaha menemukan hubungan antara faktor-faktor yang ada didalamnya. Studi kasus kadang-kadang melibatkan peneliti dengan unit terkecil seperti perusahaan atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keuntungan riset studi kasus antara lain adalah penelitian dapat dilakukan lebih mendalam sehingga dapat menjawab mengapa keadaan itu terjadi. Selain itu, melalui riset ini peneliti diharapkan dapat menemukan hubungan-hubungan yang sebelumnya tidak diharapkan, tetapi riset ini memiliki kelemahan-kelemahan, misalnya kajian secara relatif menjadi kurang luas dan dalam sulit digeneralisasikan dengan keadaan yang berlaku umum, dan cenderung mengarah ke subyektivitas, karena obyek penelitiannya dapat mempengaruhi prosuder penelitian.

Penelitian ini dipilih sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian yang dipilih, untuk memahami kelas sosial pada nelayan di Perairan Mayangan serta bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis data tertulis berupa kata-kata dan kalimat yang berisi tentang sistem bagi hasil usaha penangkapan ikan antara nelayan lokal dan nelayan andon di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

3.3 Teknik Pengambilan Informan

Menurut Sulisty-Basuki (2006:182) “populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti.” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Pengertian sampel menurut Sulisty-Basuki (2006:182) “adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti”.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data dari informan atau sampel yang digunakan adalah dengan cara *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Menurut Sugiyono (2011), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Menurut Faisal (1989) didasarkan pada pertimbangan–pertimbangan, pertama: mereka yang dijadikan informan adalah mereka yang memahami sesuatu melalui proses Inkulturasi, sehingga informasi yang mereka punya bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati. Kedua, mereka yang tergolong masih berkecimpung dalam kegiatan yang diteliti. Ketiga, mereka mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai keterangan. Keempat, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi dari kemasannya sendiri. Kelima, mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing akan peneliti sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam nara sumber.

Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel dan mendapatkan informasi dengan cara *purposive sampling* kepada pihak Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dalam hal ini diwakilkan Pak Nonot Widjajanto, S.Pi sebagai Kepala Syahbandar UPT Mayangan, Probolinggo dan Pak Murdjito, S.so, MM sebagai kepala Sub Bagian Tata Usaha. Hal ini dilakukan karena tidak semua pihak Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan bertugas mengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Sedangkan dengan cara *snowball sampling* kepada juragan perahu (pemilik perahu) yang mewakili beberapa juragan perahu

yang ada di Desa Mayangan, karena dari beberapa orang yang dimintai data dengan memberikan pertanyaan yang sama jawaban yang didapatkan hampir sama.

Menurut pihak kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Provinsi Jawa Timur jumlah petugas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang ada di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebanyak 30 pegawai. Sementara itu, pihak yang bertugas mengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan khususnya bagian layanan sebanyak 2 orang jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang. Peneliti ini akan menggunakan seluruh petugas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan sebagai responden penelitian.

Keseluruhan informan yang diteliti secara umum yang dijadikan nara sumber adalah masyarakat nelayan di Mayangan. Masyarakat Mayangan ini diambil sebagai masyarakat yang tinggal di Mayangan yang melakukan berbagai bentuk pekerjaan yang ada di sana. Untuk mencari informan yang diteliti secara umum, untuk dijadikan nara sumber adalah masyarakat nelayan lokal di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Untuk pencarian informan yang dipilih berdasarkan pekerjaan nelayan setempat dan informasi yang bisa dipercaya secara valid. Dalam penelitian ini untuk mengambil data dari informan yang mengetahui informasi pokok yang diperlukan yaitu diantaranya juragan perahu (pemilik perahu), dan ABK, dari pihak Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, serta tokoh masyarakat setempat. Adapun nelayan lokal yang terdiri dari juragan darat (pemilik perahu) adalah 4 orang, dan 8 orang ABK yang terdiri dari 2 orang juru mesin, 1 orang juru mudi, 2 orang juru masak, serta 3 orang ABK biasa. Selain itu, 2 orang dari pihak PPP Mayangan, serta pengambak 2 orang, dan tokoh

masyarakat setempat sebanyak 1 orang (Kepala Kelurahan Mayangan), dan nelayan andon yang terdiri dari juragan perahu (pemilik perahu) adalah 1 orang, dan ABK 5 orang yang terdiri juru mudi 1 orang, juru masak 2 orang, dan juru mesin 2 orang. Di samping itu untuk menambah informasi agar mendapatkan informasi secara valid dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat bantu seperti HP, kamera, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengambilan Data dari Informan

No	Pengambilan Informan	Nelayan Lokal	Nelayan Andon
1	Juragan Perahu (pemilik perahu)	4 orang	1 orang
2	Juru Mesin	2 orang	2 orang
3	Juru Mudi	1 orang	1 orang
4	Juru Masak	2 orang	2 orang
5	ABK biasa	3 orang	-
6	Pihak PPP Mayangan	2 orang	-
7	Kepala Kelurahan Mayangan	1 orang	-

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2011), pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data

sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Menurut Moleong (2013), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Suryabrata (1983). Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer ini diperoleh dengan wawancara partisipasi aktif. Jenis data primer yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari interaksi dengan masyarakat nelayan dan pesisir di kawasan pantai Mayangan yang terdiri dari hasil tangkapan, jumlah Trip, dan pendapatan akhir setelah *totalan*, kemudian cara bagi hasil, perkembangan usaha penangkapan, dan stratifikasi sosial.

2. Data sekunder

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti yang dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti, dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung, sumber data sekunder ini

dapat berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan serta arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari:

- a) Kantor Kecamatan Mayangan, Kota Probolingg, meliputi: data kependudukan, data Geografis dan Topografis, data Monografi Desa Mayangan tahun 2014.
- b) Kantor Tempat Pelelangan Ikan Mayangan, Kota Probolinggo, meliputi: data Produksi Ikan tahun 2014
- c) Kantor UPT PPP Mayangan, Kota Probolinggo, meliputi: data keberangkatan kedatangan kapal, data laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, data semua kapal UPT PPP Mayangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, data tersebut harus valid yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri – ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek–obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan

perilaku manusia, proses kerja, gejala–gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2011).

Observasi merupakan metode yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan instrument berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainya (Umar, 1997). Data yang dapat diperoleh melalui teknik observasi adalah pengamatan terhadap kegiatan sistem bagi hasil nelayan lokal maupun nelayan andon di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Yaitu dengan kedatangan nelayan kemudian hasil tangkapan di bawa ke TPI untuk ditimbang dan kemudian transaksi dengan pengambak.

2. Wawancara (Interview)

Interview adalah cara memperoleh data di lapangan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden, di mana peneliti menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara (*interview guide*) agar wawancara terarah pada fokus penelitian (Nazir, 2003).

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, dan wawancara tak terstruktur. Dalam metode kualitatif biasanya digunakan wawancara terbuka dimana subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. Wawancara merupakan tanya jawab terhadap nara sumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini wawancara di tunjukkan kepada pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK yang terdiri dari hasil

tangkapan, jumlah Trip, Pendapatan akhir setelah *totalan*, kemudian cara sistem bagi hasil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

Menurut Moleong (2013), menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan *record*. Definisi dari *record* adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan diambil meliputi data Desa, data perahu nelayan lokal, dan pendapatan nelayan lokal di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.

3.6 Batasan Penelitian

Sehubungan dengan topik penelitian tentang Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Andon dan Nelayan Lokal Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur, maka peneliti memberi batasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pada nelayan lokal maupun nelayan andon.
 - a) Pola penentuan hasil kerja pada masing-masing perangkat kerja pada nelayan lokal maupun nelayan andon.
 - b) Kendala dan keadilan dalam pembagian hasil tangkapan nelayan lokal maupun andon.
 - c) Potensi konflik dari sistem bagi hasil nelayan lokal dan pereda konflik yang ditimbulkan dari sistem bagi hasil nelayan lokal.
2. Perkembangan usaha penangkapan ikan di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
3. Identifikasi sosial masyarakat nelayan di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
 - a) Perilaku masyarakat nelayan di Desa Mayangan.
 - b) Stratifikasi sosial antara juragan perahu (pemilik perahu) dengan ABK.

3.7 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), analisa data adalah data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisa

data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Adapun tahapan dalam menganalisa data sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti Komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

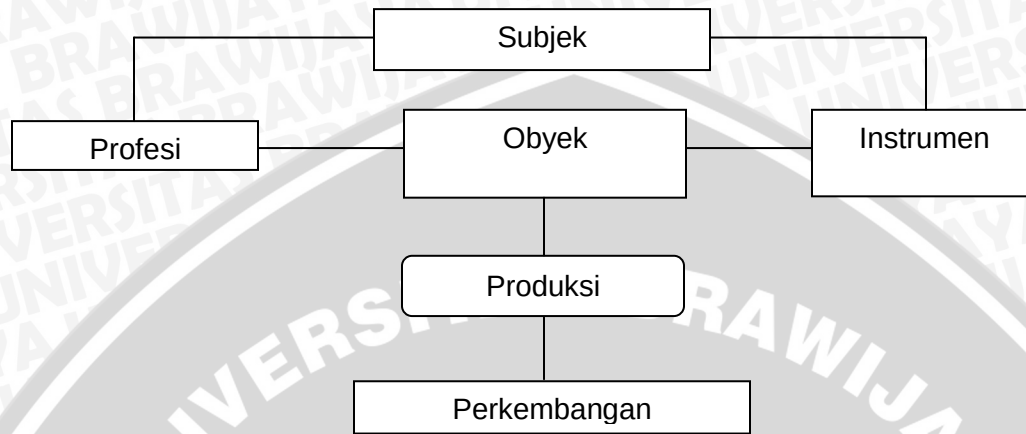
Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapang. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2011).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dimana pendekatan yang kami pakai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil Normatif Nasional yang merujuk kepada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan yang disahkan oleh Pemerintah sejak tahun 1964 dan sistem Normatif Lokal yaitu aturan bagi hasil yang disepakati secara normatif oleh masyarakat nelayan dan yang sebenarnya terjadi.

2. Untuk mengetahui perkembangan usaha penangkapan ikan atas kedatangan nelayan andon di perairan Mayangan perekonomian masyarakat nelayan.



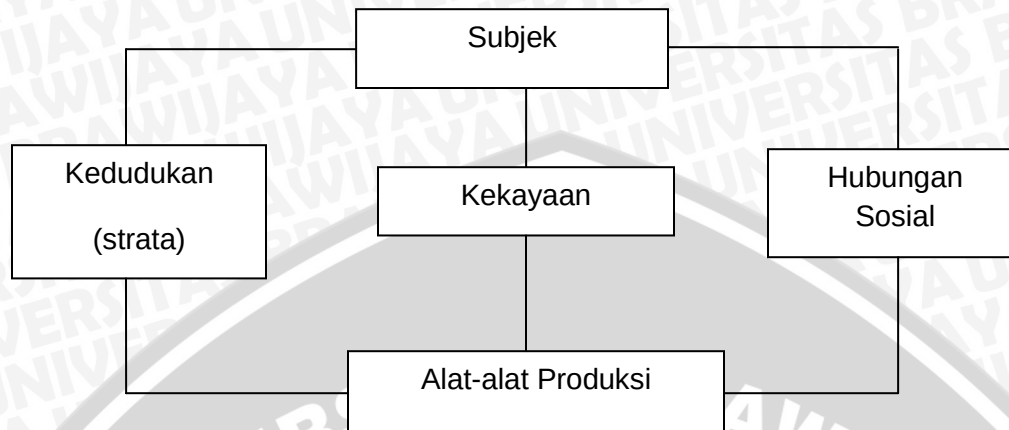
Gambar 1. Skema Perkembangan Usaha Penangkapan

Sumber : Laili, 2010

Keterangan :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha penangkapan ikan setelah kedatangan nelayan andon di Pantai Mayangan dengan subjek yang meliputi nelayan lokal dan nelayan andon. Di mana profesi kedua nelayan ini sebagai penangkap ikan dengan menggunakan instrumen (peralatan) atau jenis alat tangkap yang sama. Instrumen (alat tangkap) yang digunakan antar keduanya ini sangat berpengaruh pada hasil produksi dikarenakan obyek (sumberdaya) ikan yang terbatas. Lebih rinci, kedua nelayan ini mempunyai teknologi yang berbeda dalam penangkapan ikan. Sehingga, hasil dari nelayan andon diketahui berbeda jauh dari nelayan lokal. Dengan penjelasan di atas, semenjak kedatangan nelayan andon, kita dapat mengetahui perkembangan usaha penangkapan ikan di Perairan Mayangan.

3. Untuk menganalisis stratifikasi (kelas sosial) nelayan



Gambar 2. Skema Stratifikasi Sosial

Sumber : Laili, (2010)

Keterangan :

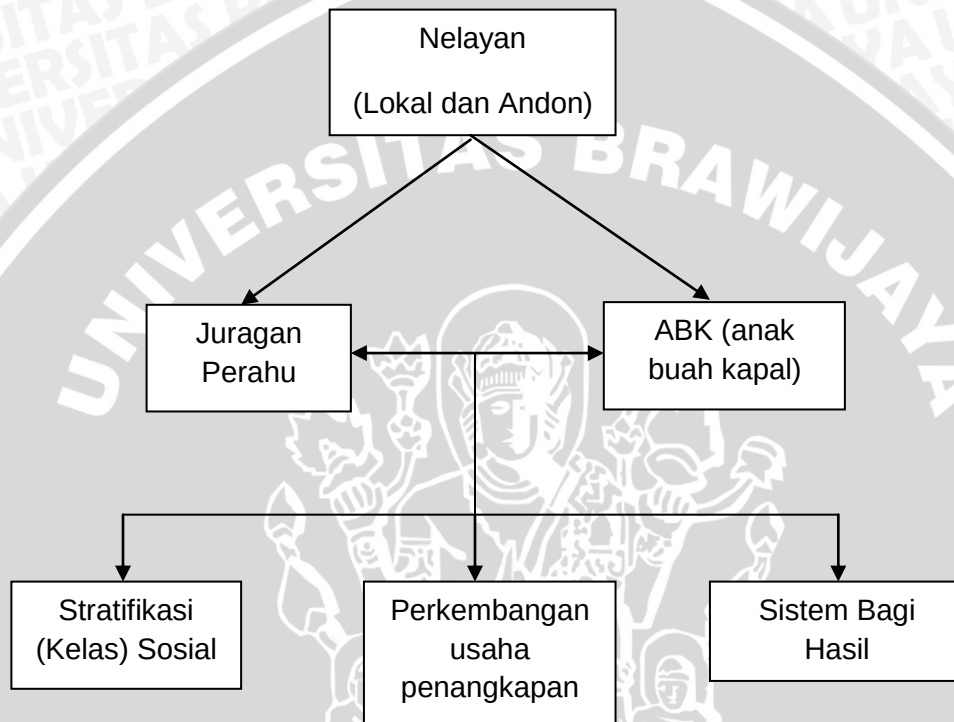
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stratifikasi (kelas sosial) nelayan di Pantai Mayangan dengan subjek yang meliputi nelayan lokal dan nelayan andon. Di mana kedudukan (strata) dari kedua nelayan ini berbeda. Perbedaan strata ini menyebabkan terjalinnya suatu hubungan sosial antar individu yang saling menghormati satu sama lain. Jika dilihat lebih jauh lagi, adanya strata yang berbeda ini mempengaruhi jenis alat-alat produksi yang digunakan oleh masing-masing nelayan. Dimana ketika strata atau kedudukan mereka tinggi akan menentukan apa yang mereka gunakan jauh lebih modern dari yang berkedudukan lebih rendah dari mereka. Penggunaan alat-alat produksi akan mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kekayaan dari masing-masing nelayan jika dilihat dari pendapatan mereka.

3.8 Kerangka Pemikiran

Nelayan di Pantai Mayangan yang meliputi nelayan lokal dan nelayan andon. Di mana profesi kedua nelayan ini sebagai penangkap ikan dimana kedudukan (strata) dari kedua nelayan ini berbeda. Perbedaan strata ini menyebabkan terjalinnya suatu hubungan sosial antar individu yang saling menghormati satu sama lain. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap hasil tangkapan dari masing-masing nelayan jika dilihat semenjak kedatangan nelayan andon sangat mempengaruhi perkembangan usaha penangkapan ikan di Mayangan.

Sistem bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, menurut perjanjian maka mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya, peraturan ini diadakan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan penggarap. Dalam penelitian sistem bagi hasil pada usaha penangkapan ikan di Mayangan antara nelayan andon dan nelayan lokal mempunyai perbedaan yaitu pada nelayan lokal pada umumnya menggunakan persentase sedangkan pada nelayan andon menggunakan bagian. Kedua nelayan ini menganut sistem bagi hasil normatif lokal karena sistem bagi hasil ini telah disepakati oleh para nelayan.

Sehingga dapat dikatakan sistem bagi hasil yang dilakukan sekarang dapat diterima dengan baik yaitu antara pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK, karena adanya saling ketergantungan dan saling pengertian antara kedua pihak. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Skema Kerangka Berfikir

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Topografis Desa Mayangan

Kota Probolinggo, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini juga terdapat pelabuhan perikanan yang cukup besar. Daerah yang menjadi lingkup perencanaan dalam pengembangan Kawasan Pesisir dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan adalah sumberdaya alam dan laut Kota Probolinggo(sumber data: Kelurahan Mayangan, 2014).

Perairan Mayangan sebagai lokasi penelitian merupakan pusat produksi perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Pantai(PPP) Mayangan merupakan pelabuhan perikanan yang cukup potensial dengan lokasi yang juga sangat strategis. Terletak hanya 2 km dari pusat Kota Probolinggo, PPP Mayangan berada tepat pada jalur akses utama pantai utara Pulau Jawa bagian Timur yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Bali, dua wilayah yang menjadi sentra ekonomi di Indonesia bagian timur, atau tepatnya secara geografis terletak pada posisi 7°44'1,02" Lintang Selatan (LS) dan 113°13'17,57" Bujur Timur (BT) (koordinat tersebut merupakan batas selatan wilayah kerja PP Mayangan yang saat ini menjadi bangunan pos jaga pintu masuk pelabuhan). Dengan suhu udara rata-rata 29⁰ C – 32⁰ C, dan ketinggian ± 4 M di atas permukaan air laut, dan 950 Mm/Thn banyaknya curah hujan, dengan 0,50 km jarak dari pusat pemerintah kecamatan, 1,75 km jarak dari kota Dati II, 100 km jarak dari Ibukota Propinsi Dati I, dan 1.000 km jarak dari Ibukota Neagara. Desa Mayangan memiliki luas wilayah 127,60 km² sebagian besar luas wilayah ini dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk.

Adapun batas-batas wilayah ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kelurahan Sukabumi + Kelurahan Mangunharjo

Sebelah Barat : Kelurahan Sukabumi

Sebelah Timur : Kelurahan Mangunharjo

(sumber data: Kelurahan Mayangan, 2014)

Letak geografis dan topografis suatu wilayah serta batasan-batasannya. Sebagian besar nelayan di Kota Probolinggo melihat batas wilayah untuk melakukan operasi, biasanya penangkapan ikan dilakukan di daerah-daerah penangkapan ikan di perairan utara Jawa seperti Selat Madura. Ketika sedang tidak musim ikan, nelayan tetap melaut dengan jarak melaut hanya sekitar Probolinggo, jarak melaut sekitar 20 mil(sumber data: Kelurahan Mayangan, 2014).

4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Mayangan

Penduduk Desa Mayangan pada Tahun 2014 berdasarkan tingkat usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan mata pencaharian, berdasarkan tingkat pendidikan, dan berdasarkan agama dapat dilihat dan dijelaskan dibawah ini :

4.1.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan TingkatUsia

Penduduk Desa Mayangan tahun 2014, berdasarkan tingkat usia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: kelompok pertama merupakan kelompok penduduk yang memiliki tingkat usia ≤ 18 tahun yang berjumlah 3.814 orang, kelompok kedua merupakan kelompok tingkat usia yang produktif bekerja 18-56

tahun yang berjumlah 4.378 orang. kelompok ketiga yaitu kelompok usia yang tidak produktif >56 tahun berjumlah 648 orang. Dari uraian diatas maka, di Desa Mayangan paling banyak tingkat usia yang produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	<18	3.814	43,14
2	18-56	4.378	49,52
3	>56	648	7,34
Jumlah		8.840	100

(Sumber data: Kelurahan Mayangan, 2014)

Masyarakat kelurahan Mayangan kisaran usia 18-56 yaitu usia produktif sehingga secara umum mereka berkontribusi terhadap usaha dibidang penangkapan ikan dan sistem bagi hasil pada nelayan di Mayangan.

4.1.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Mayangan tahun 2014, jumlah penduduk berjumlah 12.442 jiwa. Dengan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan yang berjumlah 6.276 jiwa, sedangkan pada perempuan berjumlah 6.166 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki – laki	6.276	50,44
2	Perempuan	6.166	49,56
Jumlah		12.442	100

(Sumber data : Kelurahan Mayangan, 2014)

Dari hasil diatas diketahui bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu sebesar 6.276 jiwa. Rata-rata masyarakat Mayangan khususnya laki-laki

memberikan penghasilan bagi keluarga karena selain sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, juga kebanyakan laki-laki bekerja di bidang perikanan dengan cara mengembangkan dan meningkatkan usaha dibidang penangkapan ikan.

4.1.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencapaian Desa Mayangan tahun 2014, terbagi dalam beberapa kelompok. Mayoritas penduduk Desa Mayangan bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 1.664 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	150	3,55
2	TNI/POLRI	42	0,99
3	Swasta	1.664	39,42
4	Wiraswasta	1.075	25,47
5	Tani	16	0,37
6	Pertukangan	7	0,16
7	Buruh Tani	4	0,09
8	Pensiunan	141	3,33
9	Nelayan	2.470	58,50
10	Buruh Pabrik	55	0,14
11	Jasa	506	11,98
Total		4.222	100

(Sumber data : Kelurahan Mayangan, 2014)

Masyarakat Mayangan berdasarkan mata pencapaian lebih banyak yang berprofesi sebagai nelayan dibanding yang lainnya sebesar 2.470 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa bekerja dibidang perikanan khususnya pada usaha penangkapan ikan di kawasan Mayangan sangat menjanjikan dengan potensi sumberdaya ikannya hingga banyak dari penduduk di Mayangan lebih berminat

untuk menjadi sebagai nelayan dengan cara mengembangkan dan meningkatkan usaha penangkapan di Mayangan.

4.1.2.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dan pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia itu sendiri.

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Mayangan tahun 2014, sebagian besar adalah Sekolah Dasar/MI berjumlah 3.988 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Taman Kanak-kanak	465	4,99
2	SD/MI	3.988	42,80
3	SLTP/MTs	1.814	19,47
4	SMU/MA	2.604	27,95
5	Akademi (D1-D3)	98	0,11
6	Sarjana (S1-S3)	347	3,72
Total		9.316	100

(Sumber data : Kelurahan Mayangan, 2014)

Dari hasil diatas diketahui masyarakat mayangan yang bekerja dibidang penangkapan ikan khususnya hanya mempunyai tingkat pendidikan SD/MI sebesar 3.988 orang. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan di kawasan pesisir masih sangat tertinggal dengan kawasan lain. Ini dikarenakan untuk bekerja di

bidang penangkapan sebagai buruh lebih mengandalkan skill kemampuan fisik bukan secara intelektual.

4.1.2.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Keadaan penduduk berdasarkan agama di Desa Mayangan tahun 2014 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Mayoritas masyarakat Kecamatan Mayangan sebagian besar memeluk agama islam, yaitu sebanyak 12.150 orang, sebagian lagi memeluk agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Sebagian kecil pemeluk agama Budha, Katholik, serta Hindu. Umat Beragama di Kecamatan Mayangan cukup rukun dan dapat bekerjasama. Banyak didirikan tempat beribadah yang sebagian berupa masjid dan mushollah dan sebagian kecil Gereja Kristen, dan Katholik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	12.150	97,65
2	Kristen	139	1,12
3	Hindu	3	0,024
4	Budha	100	0,80
5	Katholik	50	0,40
6	Aliran kepercayaan lain	-	-
Jumlah		12.442	100

(Sumberdata : Kelurahan Mayangan, 2014)

Dilihat dari Tabel diatas masyarakat Mayangan lebih banyak yang beragama Islam sebesar 12.150 orang. Dari segi budaya, Islam mempengaruhi pola kehidupan nelayan dimanabagi hasil dalam Islam (Syirkah) adalah kesepakatan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan dengan rasa syukur kepada Allah S.W.T atas semua rezeki yang diperolehnya.

yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berpendapat, antara lain:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

Dasar Hukum Syirkah:

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ...”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (syirkah al-ta'awun) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Firman Allah SWT. dalam surat al-Anfal ayat 41 yaitu:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *“ Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal : 41)*

Kata *ghanimah* dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syari'at Islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.

4.2 Karakteristik Fisik Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

4.2.1 Sejarah Berdirinya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan

Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo mulai didirikan pada tahun 2000 ketika Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mayangan dibangun dengan gabungan dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Probolinggo serta dana luar negeri SPL-OECF (sumber data: Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, 2014).

PPI Mayangan mendapatkan peningkatan status menjadi sebuah Pelabuhan Perikanan Pantai melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 12/MEN/2004 pada tanggal 25 Februari 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Perubahan status ini kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor: 061.1/1137/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo dan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 31 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maka ada perubahan Nomenklatur UPPPP Mayangan menjadi UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan. Sebagai sebuah lembaga/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur

yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Fasilitas tersebut, baik fasilitas pokok maupun pendukung dikelola oleh UPPPP Mayangan dengan berpedoman pada standar pelayanan publik serta berdasarkan aturan yang berlaku (sumber data: Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, 2014).

Setelah proses pembangunan fasilitas pokok selesai, pada tanggal 29 Desember 2008 PPP Mayangan bersama dengan PPP Tamperan di Kabupaten Pacitan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi karena pada saat itu fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan operasional masih dalam proses pembangunan serta terkendalanya pemindahan nelayan dari pelabuhan lama (Pelabuhan Niaga Tanjung Tembaga Probolinggo), maka kegiatan kepelabuhanan secara minimal baru mulai dilaksanakan tanggal 17 Pebruari 2010. Pada tahun 2012 seluruh fasilitas di PPP Mayangan telah siap untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Fasilitas tersebut, baik fasilitas pokok maupun pendukung dikelola oleh UPPPP Mayangan dengan berpedoman pada standar pelayanan publik serta berdasarkan aturan yang berlaku (sumber data: Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, 2014).

Sebagai salah satu instansi layanan publik, tujuan awal dibangunnya PP Mayangan adalah untuk menampung dan melayani aktifitas perekonomian berbasis perikanan yang dilakukan oleh nelayan baik pendatang maupun nelayan asli Kota Probolinggo. Kantor PPP Mayangan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kantor UPT PPP Mayangan

(sumber data: Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, 2014).

4.2.2 Fasilitas Yang Disediakan Oleh PPP Mayangan

Seluruh fasilitas yang ada di PPP Mayangan baik pokok maupun penunjang yang saat ini telah tersedia di PPP Mayangan dapat digunakan untuk umum khususnya bagi para pengguna jasa maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk memajukan bidang industrialisasi perikanan di Kota Probolinggo dan sekitarnya. Diharapkan dengan semakin lengkapnya fasilitas di PPP Mayangan, maka akan lebih banyak investor yang mau menanamkan modal untuk membangun industri perikanan berskala besar di kawasan Kota Probolinggo dan sekitarnya (fasilitas pokok dan penunjang operasional PPP Mayangan – Kota Probolinggo tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8).

**Tabel 7. Fasilitas Pokok dan Penunjang Operasional
PPP Mayangan – Kota Probolinggo Tahun 2014**

Fasilitas	Kapasitas/Luas	Kondisi	Keterangan
Alur Pelayaran			
Panjang	925 M	1	Mengalami sedimentasi yang menyebabkan penyempitan alur
Lebar	75 – 150 M	1	
<i>Breakwater</i>			
Sisi Barat	450 M	2	Kurang bisa mereduksi gelombang masuk saat angin kencang
Sisi Timur	925 M	2	Kurang bisa mereduksi gelombang masuk saat angin kencang
Dermaga			
Dermaga Pier	201 M	2	Terbagi menjadi 2 Pier, Pier 1 mengalami kerusakan pada kayu fender
Dermaga Landing Beach	369 M	1	Terbagi menjadi 2 Dermaga
Dermaga Sheet Pile	725 M	1	Terbagi menjadi 2 Dermaga
Lampu Suar	2 Unit	1	
Rambu Navigasi	2 Unit	3	
Kolam Labuh	20,05 Ha	2	Mengalami sedimentasi pada sisi tepi kolam
Lahan Industri			
Hulu/Hilir	2,2 Ha	1	
Gd. Handling & Packing Ikan	1.476 m ²	1	Terbagi menjadi 24 gedung processing
Lahan Spoil Bank	22,5 Ha	1	Belum disewakan
Gd. Pelelangan Ikan/TPI	1.300 m ²	1	
Kantor Administrasi	400 m ²	2	
Balai Pertemuan Nelayan	252 m ²	1	
Docking	15.860 m ²	5	

Instalasi Listrik	65.900 kWH	1	
Kantor Keamanan Terpadu	135 m ²	1	Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu TNI – AL
SPDN	423 m ²	1	
Tangki SPDN	8 kL	1	
Tempat Pembuangan	600 m ²	2	Terkendala pembuangan ke TPA oleh BLH Kota Probolinggo
Transit Sheet	3 Unit	1	@ seluas 264 m ²
Guest House	120 m ²	1	
Direksi Kit	4 Unit	1	@ seluas 45 m ²
Mess Operator	40 m ²	1	
Gerobak Motor	2 Unit	2	
Sekoci Pengawas	1 Unit	2	

(Sumber: PPP Mayangan, 2014)

Keterangan kondisi :

- 1 = Baik/Berfungsi Normal
- 2 = Rusak Ringan/Berfungsi Kurang Sempurna
- 3 = Rusak Berat/Berfungsi Tidak Sempurna
- 4 = Tidak Bisa Digunakan/Tidak Berfungsi Sama Sekali
- 5 = Dalam Proses Pembangunan /Pengadaan

Tabel8. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan 2014

Fasilitas Fungsional		Kapasitas	Luas	Kondisi	Keterangan
1.	Tempat Pelelangan Ikan	1,300	m ²	1	DKP Kota Probolinggo
2.	Pasar Ikan	2,500	m ²	2	Pasar Sementara
3.	Rambu-Rambu Navigasi	2	Buah	2	Lampu Pandu Rusak
4.	Lampu Suar	2	Buah	1	
5.	Menara Pengawas	-	-	0	
6.	Sumber Air	-	-	1	PDAM
7.	Penampung / Tangki Air	1	Unit	3	
8.	Pengolah Air	1	Unit	4	Alat Desalinasi BRKP
9.	<i>Fire Safety / Hydrant</i>	7	Unit	1	Berbentuk APAR
10.	Pabrik Es	-	-	0	
11.	<i>Cold Storage</i>	10,500	m ²	5	Proses Pembangunan
12.	Daya Listrik	65,900	kWH	1	
13.	Genset			1	
14.	SPBN	423	m ²	1/5	1 SPDN dan 1 SPBB
15.	Tangki BBM	8,000	Liter	1/5	1 SPDN dan 1 SPBB
16.	<i>Docking</i>	16,435	m ²	1	Milik Swasta
17.	<i>Slipway</i>	4	Lajur	1	Milik Swasta
18.	Bengkel	-	-	3	Tersedia Peralatan Lengkap
19.	Penjemuran Jaring	1,240	m ²	1	
20.	Perbaikan Jaring	264	m ²	1	Memfaatkan Transit Sheet
21.	Gudang Peralatan	-	-	0	Dalam Proses Pengusulan
22.	Kantor	400	m ²	1	

23.	Forklift	-	-	0	
24.	Alat Berat	-	-	0	
25.	Kapal Pengawas	1	Unit	1	Ukuran 2 GT
26.	Instalasi Pengolah Limbah	208	m ²	2	
27.	Tempat Pembuangan Sampah	600	m ²	2	
28.	Pelataran Parkir	2,770	m ²	1	

Sumber: Data Pembantu Pengurus Barang UPT PPP Mayangan

Selain Lahan Industri seluas 2,2 Ha yang telah tersedia, masih terdapat lahan yang masih belum difungsikan seluas lebih dari 14 Ha dan saat ini masih dalam tahap persiapan fasilitas pokok. Dari 2,2 Ha lahan tersebut, sebagian besar telah disewakan kepada pelaku usaha perikanan dalam rangka mendukung program industrialisasi perikanan di kawasan Kota Probolinggo, demikian juga fasilitas bangunan seperti gedung *processing* yang telah tersewa.

Dilihat dari Tabel diatas fasilitas yang disediakan oleh PPP Mayangan sangatlah penting untuk memajukan bidang perikanan di Kota Probolinggo dan sekitarnya. Bagi nelayan sendiri penting untuk menunjang aktifitas mereka dibidang usaha penangkapan ikan. Seperti adanya TPI di daerah Mayangan buat nelayan tempat untuk bertransaksi dengan pengambang, apabila tidak ada TPI akan susah bagi mereka melakukan transaksi.

4.2.3 TPI (Tempat Pelelangan Ikan)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah salah satu UPTD yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo dan merupakan aset milik Pemerintah Kota Probolinggo. UPTD TPI berada di kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang pembangunannya dimulai tahun

2000. Tujuan utama dibangunnya TPI adalah untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan yang melakukan bongkar di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Tetapi, pada kenyataannya tujuan dan fungsi utama TPI yaitu pelelangan belum bisa diterapkan karena diharapkan para nelayan beradaptasi terlebih dahulu dengan adanya TPI yang baru. Adapun saat ini prosedur kegiatan/pelayanan di TPI adalah sebagai berikut :

- a. Proses pemasaran hasil tangkapan para nelayan di PPP Mayangan dimulai pada saat kapal mendarat dan ikan didaratkan dipinggir laut.
- b. Pedagang ikan telah menunggu di pinggir laut, kemudian terjadi tawar menawar harga antara nelayan dan pedagang ikan.
- c. Setelah terjadi kesepakatan harga ikan akan dibawa ke TPI untuk dilakukan penimbangan dan penataan oleh petugas TPI. Setelah proses tersebut selesai, ikan akan diangkut untuk dikirim ke konsumen yaitu ke luar kota seperti lumajang, jember, maupun daerah probolinggo itu sendiri. TPI Mayangan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. TPI (Tempat Pelelangan Ikan)

4.3 Sistem Bagi Hasil

Menurut Harahap (1993) *dalam* Laila (2010), sistem bagi hasil dalam perikanan tangkap adalah merupakan suatu bentuk pemanfaatan faktor produksi dengan pembagian hasil terhadap suatu unsur produksi yang lain, yaitu tenaga kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bersih usaha dan juga dalam bentuk lawuhan sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh pada saat tertentu.

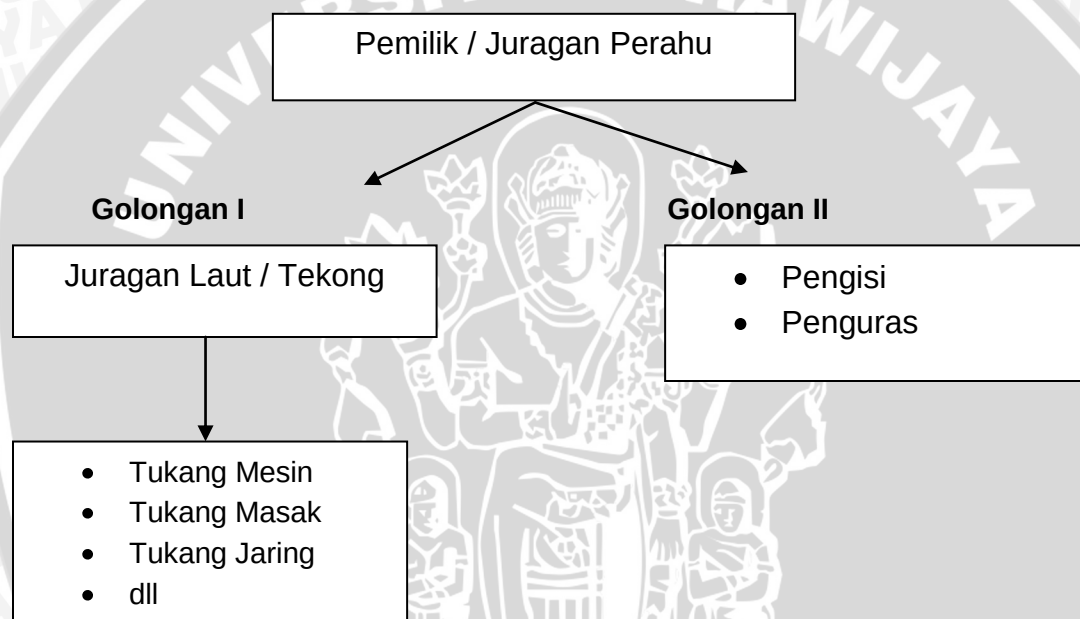
Pembagian hasil yang dilakukan pada nelayan di Desa Mayangan adalah dengan hasil bersih usaha yaitu, penerimaan (nilai produksi setelah diambil untuk pembagian lawuhan) dikurangi biaya operasional dan retribusi TPI (tempat pelelangan ikan). Pembagian lawuhan atau "*nduk-ghinduk*" adalah sebagai uang saku bagi nelayan selama tidak melaut. Besar dan perbandingannya tidak tetap tergantung jumlah produksi dan keadaan pada waktu itu. Di Mayangan, contohnya pada nelayan lokal pembagian lawuhan atau "*nduk-ghinduk*" biasanya 10% dari hasil tangkapan.

4.3.1 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Usaha Penangkapan Ikan

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa (Nuwri, 2013).

Struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban pada apa yang akan dikerjakan. Dalam usaha penangkapan ikan pada nelayan lokal dan nelayan andon di pelabuhan Mayangan, ada dua fungsi dari struktur organisasinya yaitu *juragan perahu* (pemilik perahu) dan tekong (nahkoda/ABK), hal ini dapat dilihat pada gambar struktur organisasi.

4.3.1.1 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Pada Nelayan Lokal



Gambar 6. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja pada Nelayan Lokal

Sumber : data primer, 2015

Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat pemilik (Juragan perahu) sebagai pemimpin dan membawahi dua golongan. Golongan pertama adalah juragan laut (tekong) yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan dan bertugas sebagai juru mudi perahu. Kemudian ABK yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan dan bertugas sebagai, pemancing, tukang mesin, tukang masak, tukang jarring, dll. Sedangkan golongan kedua adalah pekerja yang tidak

terlibat secara langsung dalam operasi penangkapan yaitu sebagai pengisi dan pengurus. Tugas juragan laut (juru mudi) “*tekong*” dan ABK menurut golongannya :

1. Pekerja pada golongan pertama adalah sebagai berikut beserta tugasnya :

- Juragan laut “*tekong*” sebagai pemegang kendali jalannya perahu dan sebagai pemimpin untuk mengkoordinasi seluruh ABK dalam melakukan kegiatan penangkapan.
- Tukang Jaring bertugas secara langsung dalam proses penangkapan yaitu menangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring.
- Tukang mesin (montir) tugasnya memperbaiki mesin kapal apabila terjadi kerusakan yang parah dan service mesin sebelum maupun pada saat melakukan operasional.
- Tukang masak tugasnya adalah menyiapkan makanan untuk seluruh ABK.

2. Pekerja pada golongan kedua adalah sebagai berikut beserta tugasnya :

- Pengisi perahu
Pengisi perahu adalah orang yang bertugas mengisi perlengkapan perahu untuk melakukan operasi penangkapan ke laut, misalnya seperti sembako, solar, air PDAM, es, dan keperluan-keperluan lainnya yang dibutuhkan dalam operasi penangkapan ikan.
- Pengurus perahu
Pengurus perahu adalah orang yang bertugas menjaga perahu pada saat perahu berlabuh dan membersihkan perahu sebelum kapal kembali melaut. Secara umum pengurus perahu bertanggung jawab atas kebersihan,

kerapian, dan keamanan perahu, yaitu :

- Menguras air di perahu
- Mengamankan perahu dari ombak besar agar tidak hanyut dibawah arus
- Mengecat perahu
- Menyiapkan fisik perahu untuk melaut

Pekerja pada golongan kedua diawasi oleh juragan perahu (pemilik perahu), karena kegiatan pada pekerja golongan kedua tidak dilakukan pada saat kegiatan penangkapan sehingga juragan perahu (pemilik perahu) dapat memantau pekerjaan yang dilakukan oleh ABK golongan kedua.

4.3.1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Pada Nelayan Andon



Gambar7.Struktur Organisasi dan Pembagian Kerjapada Nelayan Andon

Sumber: data primer, 2015

Dari struktur organisasi tersebut nelayan andon pada waktu melaut terdapat dua golongan dan mempunyai tugas masing-masing dalam pembagian kerja nelayan andon. Golongan pertama adalah pemilik perahu atau juragan perahu yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan ikan yaitu sebagai pengoperasional perahu dan pemantau ikan. Sedangkan golongan kedua yaitu ABK (anak buah kapal) yang mempunyai peranan yang sangat vital dalam melakukan penangkapan ikan secara langsung yaitu diantaranya juru mesin 2 orang, juru mudi 2 orang, juru masak 2 orang, penarik jangkar atau pemberat 1 orang, penyelam 1 orang, tukang lampu 2 orang, penarik jaring 15 orang (semua yang ada di perahu).

Tugas pembagian kerja nelayan andon menurut golongannya masing-masing:

- Pembagian kerja nelayan andon golongan pertama beserta tugasnya:
 - a. Pemilik perahu atau juragan laut sebagai pemimpin dalam perahu untuk mengkoordinasi seluruh ABK yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan ikan.
 - b. Pengoperasional perahu tugasnya yaitu sebagai pemegang kendali perahu dan mengkoordinasi seluruh ABK dalam melakukan operasi penangkapan ikan, tugas ini dilakukan langsung pemilik perahu atau juragan perahu.
 - c. Pemantau ikan tugasnya sebagai memantau atau mendeteksi tempat berkumpulnya ikan, tugas ini dilakukan langsung oleh pemilik perahu atau juragan perahu dengan menggunakan alat pendeteksi ikan.
- Pembagian kerja nelayan andongolongan kedua beserta tugasnya:
 - a. ABK (anak buah kapal) sebagai pekerja dan ikut langsung dalam operasi penangkapan ikan dilaut.

- b. Juru mesin tugasnya untuk memperbaiki mesin yang mengalami kerusakan dalam melakukan operasional penangkapan ikan, dan juru mesin-nya adalah 2 ABK (anak buah kapal) yang ditunjuk langsung oleh pemiik perahu atau juragan perahu.
- c. Juru mudi tugasnya sebagai pemegang kendali jalannya perahu untuk melakukan operasi penangkapan ikan dilaut, juru mudi dilakukan langsung oleh ABK yang ditunjuk langsung oleh pemilik perahu atau juragan perahu.
- d. Juru masak tugasnya untuk membuat makanan didalam perahu, dan juru masak dilakukan oleh ABK yang berjumlah 2 orang.
- e. Penarik jangkar atau pemberat tugasnya yaitu untuk menarik jangkar atau pemberat dengan menggunakan gardan, supaya jangkar atau pemberat tersebut bisa naik ke perahu dengan cepat, tugas ini dilakukan oleh 1 ABK (anak buah kapal).
- f. Penyelam tugasnya untuk apabila terjadi kesalahan teknis dalam melakukan penangkapan seperti jaring tersangkut pada baling-baling perahu, dan apabila tersangkutnya talidalam operasi penangkapan ikan, tugas ini dilakukan oleh 1 ABK (anak buah kapal).
- g. Bagian lampu perahu tugasnya untuk mengatur penerangan yang ada diperahu pada saat akan berangkat melaut atau melakukan operasi penangkapan ikan pada malam hari, Bagian lampu penerangan yang ada diperahu dilakukan oleh 2 ABK.
- h. Penarik jaringtugasnya yaitu menarik jaring dan menatanya kembali pada waktu operasi penangkapan ikan. Penarik jaring ini, dilakukan oleh semua orang yang ada diperahui yang berjumlah 15 orang 1 pemilik perahu atau juragan perahu dan 14 ABK (anak buah kapal).

Didalam pembagian kerja pada nelayan andon golongan pertama yaitu pemilik perahu atau juragan perahu yang ikut serta langsung dalam melakukan operasi penangkapan ikan dan sebagai pengawas langsung ABK (anak buah kapal) dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing, yang sudah ditentukan oleh pemilik perahu atau juragan perahu.

Sedangkan golongan kedua dalam pembagian kerja pada nelayan andonyaitu ABK (anak buah kapal) yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan ikan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya kepada pemilik perahu atau juragan perahu, sehingga dapat meghasikan pekerjaan yang maksimal dalam operasi penangkapan ikan.

4.3.2 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan

Sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: yang pertama sistem bagi hasil secara Nasional yang merujuk kepada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan yang disahkan oleh Pemerintah sejak tahun 1964. Dan yang kedua adalah sistem bagi hasil secara lokal yaitu aturan bagi hasil yang dibuat oleh masyarakat nelayan itu sendiri dan sepekatinya secara bersama-sama oleh masyarakat Nelayan.

1. Sistem Bagi Hasil Nasional

Secara hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 2 tentang pembagian hasil yang berbunyi Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka

masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Selanjutnya, peraturan hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 3 tentang pembagian hasil yang berbunyi: (1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. Perikanan laut:

- a. Jika di pergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
- b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

2. Perikanan darat:

- a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
- b. Mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

(2) Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Peraturan yang lain, aturan tentang sistem bagi hasil juga di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1964 pasal 4 yang berbunyi bahwa beban–beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus sebagai berikut :

1. Perikanan laut:

- a. Beban–beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok atau jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut , biaya sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran–iuran yang disahkan oleh pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu atau kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain–lainnya.
- b. Beban–beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu atau kapal serta alat–alat yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak es dan lain sebagainya.

2. Perikanan darat:

- a. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya – biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu.
- b. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak: disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat di pakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan.

- c. Bahan–bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari–hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak dan penangkapannya pada waktu panen.

Sedangkan peraturan hukum sistem bagi hasil perikanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 5 yang berbunyi (1) jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan–bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai. (2) dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka jika disesuatu daerah didalam membagi bahan–bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka pemerintah daerah tingkat II dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut diatas. Penetapan pemerintah daerah tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan dan Kelautan

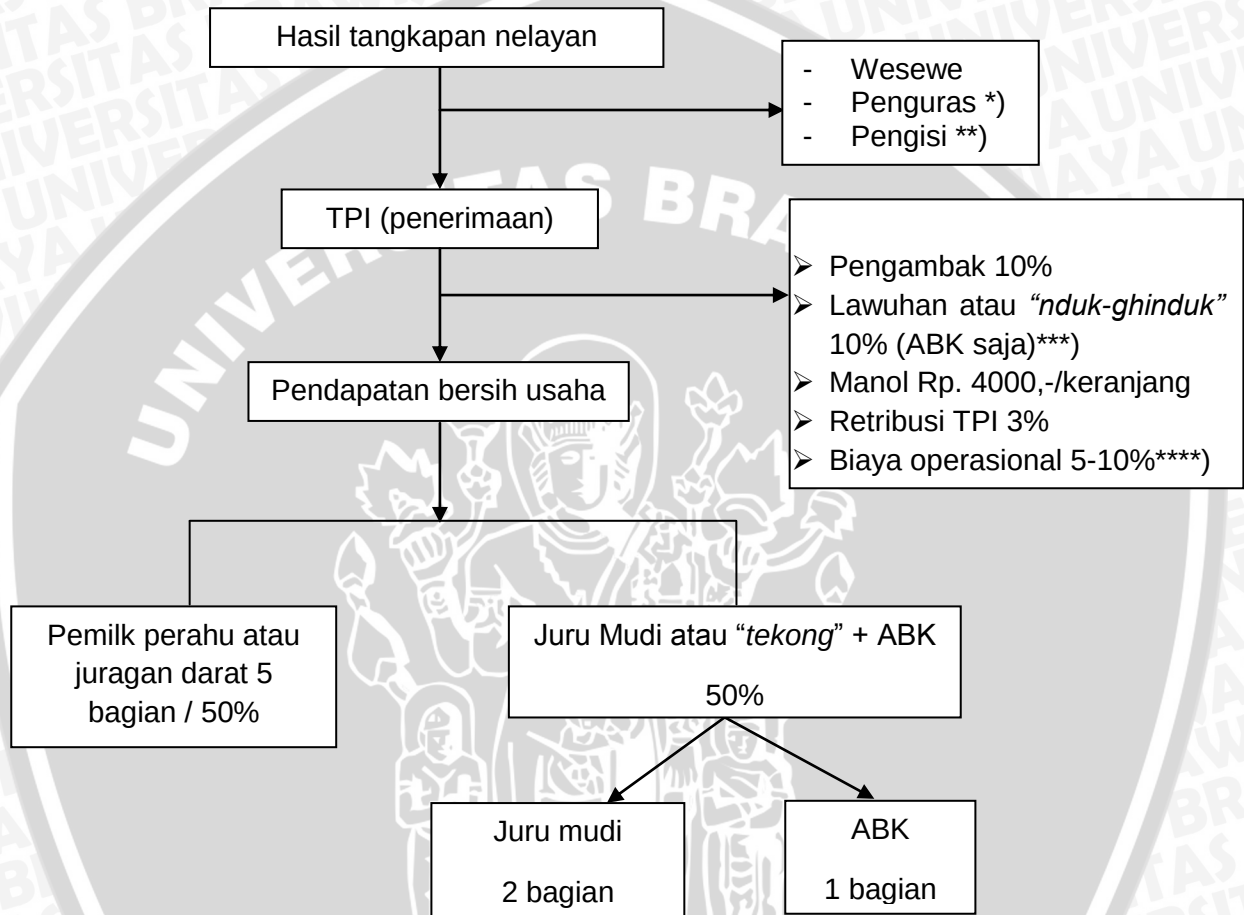
2. Sistem Bagi Hasil Lokal

Sistem bagi hasil secara lokal adalah aturan sistem bagi hasil yang dibuat oleh Nelayan itu sendiri, dan disepakati secara bersama-sama oleh masyarakat nelayan. Sistem bagi hasil berbeda-beda tergantung alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Pembagian hasil yang lebih dikenal dengan sebutan bagian, yaitu bagian hasil yang diperoleh oleh nelayan dari hasil tangkapan dalam setiap *trip* (melaut). Upah kerja yang diperoleh nelayan ABK bervariasi tergantung pembagian kerja yang diterapkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Misal pembagian kerja yang diterapkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu di Desa Mayangan Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo, dalam pembagian kerja-nya ABK ikut melaut 8 bagian yang terdiri dari 8 orang, satu ABK mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak mendapatkan 3 bagian untuk dibagi 3 orang. Sehingga yang merangkap pekerjaan akan memperoleh hasil yang lebih dari pada nelayan ABK biasa. Sehingga sistem bagi hasil secara lokal, dianggap lebih tepat sesuai dengan nilai, norma dan tradisi secara turun-temurun masyarakat nelayan.

4.3.3 Bagi Hasil Usaha Penangkapan Nelayan Lokal dan Nelayan Andon

a. Perahu Milik Nelayan Lokal

Untuk melihat proses pendaratan ikan sampai bagi hasil dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Proses Pendaratan Ikan Sampai Dengan Bagi Hasil Nelayan Lokal

Keterangan: wesewe dibayar menggunakan ikan oleh juragan perahu sebesar ± 1 kg

*) penguras dibayar menggunakan ikan oleh juragan perahu sebesar ± 1 kg

**) pengisi dibayar menggunakan ikan oleh juragan perahu sebesar ± 1 kg

***)) Lawuhan "nduk-ghinduk" 10% diberikan pada juragan laut atau "tekong" dan ABK.

****) Biaya operasional ditanggung oleh pemilik perahu atau juragan perahu dan ABK, jika terjadi kerusakan mesin atau rusaknya jaring.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan dari proses pembongkaran hasil tangkapan ikan nelayan lokal sampai dengan pembagian hasil. Pada proses pembongkaran ikan menuju TPI disini biasanya terjadi pengambilan ikan yang dilakukan oleh juru mudi dan anak-anak kecil biasanya mengambil ikan yang jatuh pada saat diangkut oleh tukang pikul atau manol, tetapi jumlahnya hanya sedikit, karena pada saat diangkut oleh manol atau tukang pikul menuju TPI (tempat pelelangan ikan) ada yang mengawasi yaitu dari anak buah penjual ikan. Apabila anak-anak tersebut dimarahi oleh pengurus kapal, maka mereka akan menceburkan diri mereka ke laut di bawah dermaga. Setiap hari mereka menunggu datangnya kapal yang mengangkut ikan dan mengambil ikan tersebut, kemudian mereka menjual ikannya pada bakul-bakul kecil di sekitar TPI dengan harga yang sangat murah. Biasanya penjual ikan yang diberikan tugas oleh pemilik perahu atau juragan darat untuk menjualkan ikan hasil tangkapan yaitu masih sanak saudara dari pemilik perahu atau juragan perahu.

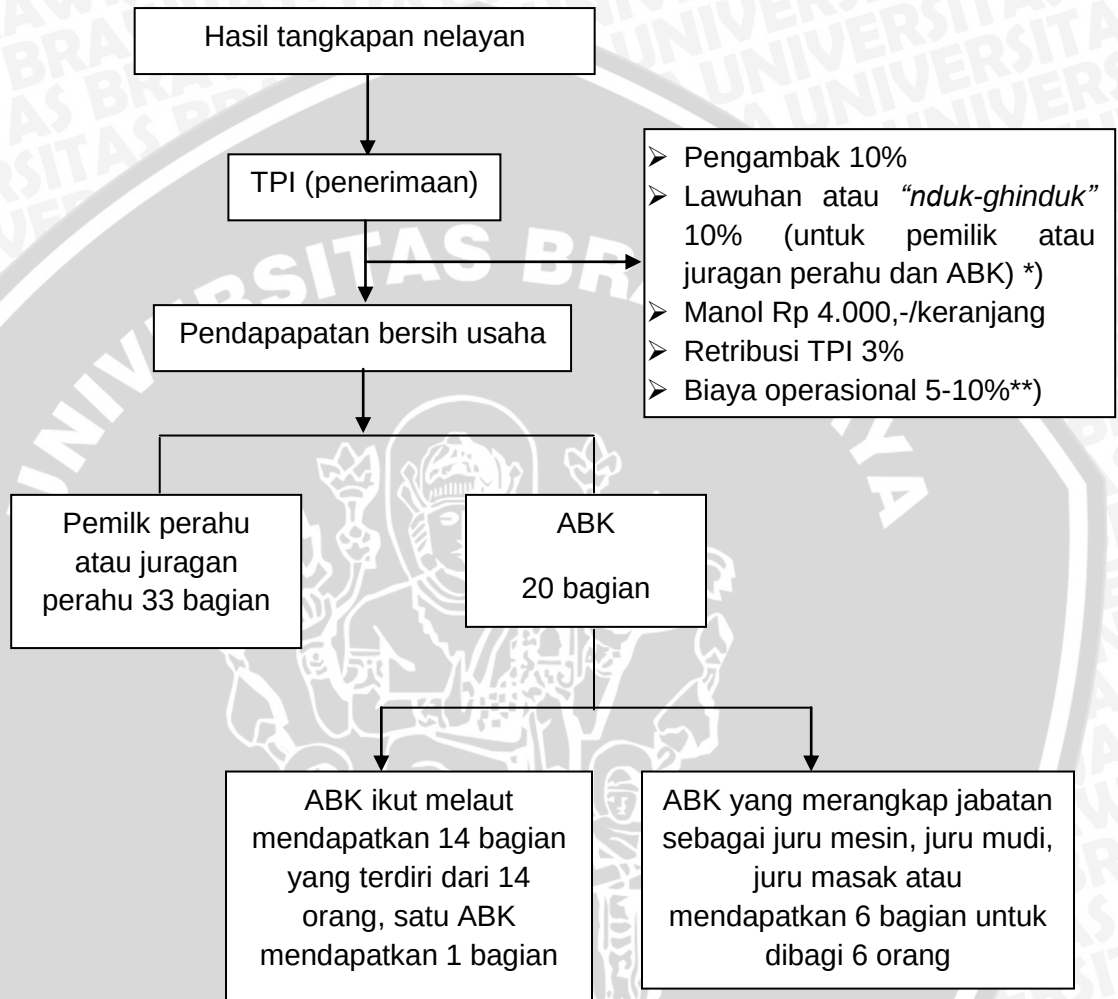
Sebelum ikan sampai di TPI dan telah dilakukan potong "*wesewe*"(ikan yang yang diberikan oleh juragan kepada ABK setelah melaut) dilakukan oleh ABK, serta pembagian dari hasil tangkap diberuntukkan bagi pengurus dan pengisi sebagai upahnya, dalam hal ini yang mengatur pembagiannya adalah juragan perahu atau pemilik perahu. Setelah ikan sampai di TPI, ABK diberikan "*nduk-ghinduk*"(lawuhan) sebanyak 10% dri hasil tangkapan oleh juragan perahu untuk uang jajan mereka selama tidak pergi melaut. Kemudian pengambak memberikan potongan sebesar 5% atau 10% apabila biaya operasional meminjam kepada pengambak sebagai pengembalian modal (setelah *totalan*) untuk biaya operasional melaut. Dari hasil penerimaan tersebut ada beberapa potongan sebelum dibagi hasil, yaitu pengambak

sebesar 10%, sebagai lawuan berupa uang sebesar 10% untuk seluruh ABK, pembayaran manol Rp. 4000,-/keranjang, retribusi sebesar 3% diserahkan ke pihak TPI, biaya operasional.

Dari beberapa potongan tersebut diperoleh pendapatan bersih yang siap untuk dilakukan bagi hasil. Dari pendapatan bersih dilakukan pembagian hasil tangkapan dibagi dua antara pemilik perahu (juragan perahu) dengan juru mudi (juragan laut) (50%:50%). Kemudian pembagian bagi hasil selanjutnya adalah juragan laut atau "*tekong*" 2 bagian dan ABK 1 bagian. Pada pembagian hasil antara pemilik perahu dan ABK terdapat 1 juru mudi "*tekong*" dan 7 Anak Buah Kapal (ABK). Sistem pengupahan kepada nahkoda atau "*tekong*" dan ABK tidak langsung diberikan karena akan disimpan oleh juragan perahu dan akan diberikan pada saat totalan. Sebelum melakukan sistem pengupahan menghitung pendapatan bersih yaitu penjualan hasil tangkap seluruhnya dikurangi total biaya. Pendapatan yang diterima oleh juragan perahu dan upah yang diberikan kepada juragan laut dan ABK yaitu setelah pendapatan bersih dibagi dua yaitu 50% bagian untuk juragan perahu dan 50% bagian untuk juru mudi (juragan laut) dan 7 ABK dengan pembagian "*tekong*" 1 orang mendapatkan 2 bagian dan 7 bagian untuk ABK sebanyak 7 orang.

b. Perahu Milik Nelayan Andon

Untuk melihat proses pendaratan ikan sampai bagi hasil dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar9. Proses Pendaratan Ikan Sampai Dengan Bagi HasilNelayan Andon

Keterangan: *) Lawuhan atau “nduk-ghinduk” 10% dibagi antara pemilik atau juragan perahu dengan ABK atau “belah”.

**) Biaya operasional ditanggung oleh pemilik perahu atau juragan perahu dan ABK, jika terjadi kerusakan mesin atau rusaknya jaring.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan dari proses pembongkaran hasil tangkapan ikan oleh nelayan andon sampai dengan pembagian hasil. Pada proses pembongkaran ikan menuju TPI disini biasanya terjadi pengambilan ikan yang dilakukan oleh juru mudi dan anak-anak kecil biasanya mengambil ikan yang jatuh pada saat diangkut oleh tukang pikul atau manol, tetapi jumlahnya hanya sedikit, karena pada saat diangkut oleh manol atau tukang pikul menuju TPI (tempat pelelangan ikan) ada yang mengawasi yaitu dari anak buah penjual ikan. Apabila anak-anak tersebut dimarahi oleh pengurus kapal, maka mereka akan menceburkan diri mereka ke laut di bawah dermaga. Setiap hari mereka menunggu datangnya kapal yang mengangkut ikan dan mengambil ikan tersebut, kemudian mereka menjual ikannya pada bakul-bakul kecil di sekitar TPI dengan harga yang sangat murah. Biasanya penjual ikan yang diberikan tugas oleh pemilik perahu atau juragan perahu untuk menjualkan ikan hasil tangkapan yaitu masih sanak saudara dari pemilik perahu atau juragan perahu.

Pendapatan bersih diperoleh dari jumlah penerimaan hasil produksi setelah dipotong lawuhan atau "*nduk-ghinduk*" 10% dibagi antara pemilik atau juragan perahu dengan ABK, pembayaran untuk pengembak sebesar 10%, pembayaran manol Rp 4.000,/keranjang sekali trip bisa dapat ± 10 keranjang, retribusi TPI sebesar 3%, dan dipotong biaya operasional untuk terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaring, yang membawa uang biaya operasional atau disebut dengan uang tengah adalah pemilik perahu atau juragan perahu. Kemudian dari pendapatan bersih tersebut dilakukan pembagian hasil yaitu antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK. Pembagian hasil atau "*umanan*"(biasanya nelayan andon menyebutkan) dilaksanakan di rumah pemilik perahu atau juragan perahu, biasanya

pembagian hasil atau “*umanan*” ini dilakukan setelah pemilik perahu atau juragan perahu melakukan *totalan* hasil penjualan ikan dengan penjual ikan. Pemilik perahu atau juragan perahu memperoleh 33 bagian yang terdiri dari ikut melaut 1 bagian, perahu 8 bagian, mesin 12 bagian, gardan 2 bagian, alat tangkap 7 bagian, nahkoda 2 bagian, perbekalan 1 bagian, sedangkan ABK mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau “*belah*”(biasanya nelayan andon menyebutkan) ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau “*belah*” mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau “*belah*” yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau “*prapen*”(biasanya nelayan andon menyebutkan) mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.



Tabel 9. Pembagian Hasil Nelayan Lokal dan Nelayan Andon

Nelayan Lokal	Nelayan Andon
1. Pendapatan - Juragan darat (pemilik perahu) 50% - ABK 50% Dengan pebagian : - Juru mudi 2 bagian - ABK 1 bagian	1. Pendapatan ▪ Juragan darat (pemiik perahu) 33 bagian Dengan pembagian : - nahkoda 2 bagian - ikut melaut 1 bagian - perahu 8 bagian - mesin 12 bagian - gardan 2 bagian - alat tangkap jaring 7 bagian Perbekalan 1 bagian ▪ABK 20 bagian Dengan pembagian : - ABK ikut melaut 14 bagian 1 orang 1 bagian - 6 orang ABK yang merangkap tugas juru mudi,juru masak, dan juru mesin 6 bagian
2. Pembagian hasil dilakukan pada saat <i>totalan (setiap kali trip)</i>	2. Pembagian hasil dilakukan pada saat <i>totalan (setiap kali trip)</i>
Sumber: data primer (2015)	Sumber: data primer (2015)

Dari matrix diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari sistem bagi hasil antara nelayan lokal dan nelayan andon yaitu pada pembagian antara juragan

perahu (pemilik perahu) dan ABK. Pada nelayan lokal pembagian antara juragan perahu dan ABK dibagi menjadi dua yaitu 50%:50%. Sedangkan pada nelayan andon pembagian antara juragan perahu (pemilik perahu) dan ABK langsung dibagi menggunakan bagian-bagian. Hal tersebut karena perbedaan budaya antara nelayan lokal dan nelayan andon.

Sistem bagi hasilnya nelayan lokal dan nelayan andon upah tidak langsung diberikan juragan perahu kepada ABK tetapi upah tersebut akan ditotal dari beberapa *trip* yang dilakukan, hal ini disebut juga *totalan*. Lamanya *totalan* tersebut tergantung dari perjanjian antara pihak juragan perahu (pemilik perahu) dan ABK. Uang hasil produksi ikan tersebut akan disimpan oleh juragan perahu (pemilik perahu) dan juragan perahu tersebut memberikan duplikat nota penjualan kepada ABK sebagai bukti hasil dari produksi ikan yang telah terjual. Ada ABK yang mengambil uang pada saat ABK tersebut membutuhkan uang dan ada juga yang diambil pada saat *totalan*. Pembagian hasil dilakukan pada saat *totalan* karena hal tersebut merupakan strategi dari juragan perahu untuk mengikat ABK agar ABK tetap bekerja kepada juragan perahu tersebut.

Memberikan sedikit hasil kepada mereka yang masih sanak keluarga atau teman rekan kerjanya. Pemberian bonus itu diluar sistem bagi hasil setelah mereka bekerja untuk menangkap ikan. Jadi terserah dari pendapatan yang mereka dapatkan setelah menangkap ikan mau dikasikan atau untuk mentraktir teman-temannya. Jadi, itu yang dinamakan budaya.

C. Contoh Perhitungan Dalam Bagi Hasil

Pendapatan kotor	= Rp 50.000.000,-
Dipotong:	
Retribusi TPI 3%	= Rp 1.500.000,-
Pengambak 10%	= Rp 5.000.000,-
Lawuhan 10%	= Rp 5.000.000,-
Manol Rp. 4000,-/ Keranjang (10 keranjang)	= Rp 40.000,-
Biaya operasional 5-10%	= Rp 5.000.000,-
Setelah dipotong hasilnya (keuntungan)	= Rp 33.460.000,-
	= Rp 33.460.00 dibagi 2
Totalan: - Juragan Perahu 50%	= Rp 16.730.000,-
- ABK (anak buah kapal) 8 orang 50%	= Rp 2.091.250,- (1 orang)

Keterangan:

- ABK dibandingkan UMR (Rp 2.091.250,- : Rp 1.437.500,-)

Seperti yang tertuang pada *Peraturan Gubernur (pergub) Jatim No. 72 Tahun 2014 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur*, menetapkan bahwa UMK Kota Probolinggo adalah sebesar **Rp. 1.437.500,-**. Bagi sebagian besar pekerja di Probolinggo angka UMK tersebut masih jauh dari harapan mereka yang mengusulkan UMK diatas 2 juta. Meskipun begitu keputusan tersebut bisa diterima oleh pekerja dan perusahaan tanpa harus melalui perdebatan yang alot. Jadi bila dibandingkan dengan UMK kota probolinggo yang masih dibawah 2 juta pendapatan ABK dari hasil melaut cukup memuaskan karena pendapatan yang mereka peroleh diatas UMK kota probolinggo sebesar Rp 2.091.250,-

- Pemilik dibandingkan Rentabilitas usaha (50% : 202%)

Rentabilitas : = $\text{keuntungan} / \text{Modal} \times 100\%$

= $\text{Rp } 33.460.000,- / \text{Rp } 16.504.000,- \times 100\%$

= 202,7 %

- Pemilik dibandingkan ABK

Rp 16.730.000,- : Rp 2.091.250,-

4.4 Perkembangan Usaha Penangkapan

Alasan nelayan andon datang ke perairan Mayangan adalah karena seringnya terjadi angin kencang terutama pada musim barat yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa, dan juga untuk berlindung, dan kejadian ini menjadi kebiasaan sehingga para nelayan andon tersebut mulai menjadikan PPP Mayangan sebagai salah satu pelabuhan pangkalan. Komoditas ikan di perairan Mayangan juga bernilai ekspor contohnya ikan Kakap (*Lutjanus*), Kerapu (*Epinephelus*), dan lain-lain. Adanya TPI sebagai sarana menjual ikan kepada tengkulak sehingga mempermudah pemasaran ikan hasil tangkapan.

Kusnadi (2000) berpendapat bahwa keterikatan individu dalam hubungan sosial merupakan pencerminan diri sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan sosial yang dilakukan individu merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaanya. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal kualitas dan kuantitas juga intensitas hubungan sosial yang dilakukan sekalipun terbuka luas peluang usaha bagi individu, melainkan juga banyak individu.

Awal mula kedatangan nelayan andon sendiri pada bulan desember-januari pada saat musim baratan atau cuaca buruk, karena tidak memungkinkan bagi nelayan andon untuk kembali kedaerahnya maka mereka berlindung kedaerah yang terdekat yaitu kedaerah Mayangan, dari sejak itu nelayan dari lamongan ini dinamakan nelayan andon bagi masyarakat Mayangan dan sudah tercatat di PPP Mayangan sebagai nelayan andon.

Dari kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan andon dan nelayan lokal di perairan Mayangan, menghasilkann tangkapan yang cukup banyak, selain itu komoditas ikannya yang bernilai ekspor dengan kualitas yang baik sehingga banyak konsumen yang berminat untuk membeli terutama pedagang. Hal tersebut menyebabkan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para pelaku perikanan tangkap (nelayan) di daerah Mayangan semakin meningkat dan berkembang.

Selain itu, karena kedatangan nelayan andon menyebabkan perekonomian di kawasan pantai Mayangan semakin maju. Karena banyaknya usaha penangkapan yang dilakukan dan hasil penangkapan yang cukup maksimal serta jumlah penduduk yang meningkat, maka menimbulkan terciptanya banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar kawasan pantai Mayangan diantaranya, sebagai nelayan, manol, pengambak, penjual makan, toko-toko, bengkel, bakul sayur, serta hasil dari produksi ikan yang diolah menjadi pindang oleh pemindang, abon pada usaha produksi abon, produksi terasi, produksi petis, dll. Dari sini dapat dilihat bahwa kedatangan nelayan andon memberikan dampak positif bagi usaha penangkapan ikan serta bagi ekonomi dan social masyarakat sekitar pantai Mayangan.

4.4.1 Perkembangan Produksi Perikanan

Kecamatan Mayangan pada sektor perikanan tangkap memiliki luas areal panjang pantai $\pm 16,4$ km dengan lebar 4 mil laut dengan jumlah nelayan yang ada sebanyak 23.041 orang. Sedangkan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 3.014 unit dengan berbagai jenis alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan diantaranya adalah *purse seine*, *gill net* (jaring insang), payang, *rawai* dasar, dan *bubu*. Pada tahun 2014 jumlah nelayan di Desa Mayangan sekitar 2.470 jiwa, sedangkan jumlah armada/kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 739 unit. Selain usaha penangkapan masyarakat Mayangan banyak melakukan kegiatan usaha dari hasil produksi penangkapan ikan seperti olahan ikan asin, krupuk, dan abon ikan.

4.4.2 Musim Ikan

Musim ikan (musim puncak) adalah banyaknya stok ikan atau jumlah ikan yang ada di perairan tersebut mencapai jumlah yang banyak dari hasil tangkapan Nelayan. Sedangkan untuk musim ikan yang ada di Mayangan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Selain itu musim ikan berkaitan erat dengan pergantian musim yang sedang terjadi. Musim ikan di perairan Mayangan dapat dibagi tiga, antara lain:

a. Musim Puncak

Musim puncak terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, ditandai dengan angin, arus dan gelombang air laut yang besar tapi halus, dari arah timur sampai tenggara menuju arah ke barat. Pada musim ini Nelayan aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan musim panen bagi Nelayan.

b. Musim Sedang

Musim sedang terjadi pada bulan April, Mei, Juni, November sampai dengan bulan Desember, yang ditandai dengan angin bertiup kencang dengan gelombang yang tinggi. Selama periode ini nelayan masih melakukan aktifitas melaut seperti biasanya.

c. Musim Paceklik

Musim paceklik terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan April, yang ditandai dengan angin bertiup kencang dan gelombang yang tinggi serta bersamaan dengan datangnya musim hujan. Pada musim ini berlangsung, nelayan masih ada yang melaut, sebagian besar tidak melaut dan memanfaatkan untuk memperbaiki perahu atau memperbaiki alat tangkap (jaring). Untuk selanjutnya bisa dilihat di Tabel 10.

Tabel 10. Musim Penangkapan Nelayan Lokal dan Nelayan Andon

No	Musim Ikan	Nelayan Lokal	Nelayan Andon
1	Musim Puncak	Selalu dapat ikan	Hasil tangkapan lumayan banyak
2	Musim Sedang	Selalu dapat ikan	Hasil tangkapan cukup banyak
3	Musim Paceklik	Selalau dapat ikan	Hasil tangkapan sedikit

Kenapa pada musim paceklik selalu dapat ikan pada nelayan lokal dan hasil sedikit pada nelayan andon karena pada nelayan lokal mereka melakukan kegiatan tidak bergantung pada musim ikan sedangkan pada nelayan andon saat musim paeklik adalah musim angin kencang dan musim ombak besar daerah tangkapan nelayan lokal dan nelayan andon juga berbeda.

4.4.3 Perkembangan Alat tangkap di Desa Mayangan

Pada tahun 2012 di wilayah perairan Mayangan terdapat 358 unit kapal penangkap ikan yang beroperasi di PPP Mayangan. Ukuran kapal yang masuk ke PPP Mayangan bervariasi mulai yang berukuran kecil dengan bobot dibawah 5 Gross Ton (GT) hingga yang lebih dari 300 GT. Alat tangkap yang digunakan oleh kapal-kapal tersebut juga terdiri dari berbagai macam jenis, akan tetapi secara umum ada 9 jenis alat tangkap dan yang sering digunakan yaitu alat tangkap cantrang, purse seine, dan payang.

Pada tahun 2013 terdapat 369 unit kapal yang beroperasi di PPP Mayangan. Ukuran kapal yang masuk ke PPP Mayangan bervariasi mulai dari dibawah 10 GT hingga yang lebih dari 300 GT. Alat tangkap yang digunakan kapal-kapal tersebut juga bervariasi, secara umum ada 7 jenis alat penangkap ikan ditambah 1 jenis kapal pengangkut yang digunakan di PPP Mayangan.

Sepanjang tahun 2014 terdapat 379 unit kapal ikan yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Ukuran kapal yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan bervariasi mulai dari dibawah 10 GT hingga yang berbobot mati lebih dari 600 GT. Dari ukuran tersebut, kapal ikan (penangkap/pengangkut ikan) yang terbesar berukuran 303 GT, sedangkan kapal dengan ukuran 303-60 GT merupakan kapal niaga/kapal penumpang yang masuk ke PPP Mayangan untuk melakukan kegiatan docking di Galangan Kapal milik PT. Wira Dockyard. Alat tangkap yang digunakan kapal-kapal penangkap/pengangkut ikan tersebut bervariasi, secara umum ada 7 jenis alat penangkap ikan ditambah 1 jenis kapal pengangkut yang digunakan di Pelabuhan Perikanan Mayangan. Data selengkapnya mengenai jumlah armada beserta alat tangkap yang digunakan ditampilkan pada Tabel 11

Tabel 11. Data Armada Kapal Perikanan Beserta Alat Tangkap Yang Digunakan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Tahun 2014

Alat	< 10 GT	11-20 GT	21-30 GT	31-50 GT	51-100 GT	> 101 GT	Jumlah
Bouke Ami	0	0	1	1	2	0	4
Bubu	0	0	3	1	0	0	4
Cantrang	29	34	64	0	0	0	127
Gill Net	3	0	1	16	10	1	31
Payang	0	2	12	0	0	0	14
Purse Seine	7	35	12	0	0	0	54
Rawai Dasar	0	1	25	96	8	0	130
Pengangkut	0	0	0	1	5	9	15
Jumlah	39	72	118	115	25	10	379

Sumber: Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan (2014)

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa mayoritas kapal berukuran 11-20 GT paling banyak menggunakan alat tangkap jenis cantrang dan *purse seine*, sedangkan kapal berukuran 31-50 GT didominasi alat tangkap rawai dasar. Hal tersebut berpengaruh pada lama operasi di laut serta wilayah opsionalnya, kapal cantrang memiliki lama operasional antara 1-3 hari dengan wilayah operasional di sekitar Selat Madura dan Laut Jawa, sedangkan lama operasi kapal rawai dapat mencapai 100 hari dengan wilayah tangkapan di daerah perairan Indonesia Timur seperti Laut Aru, Laut Avona, Laut Timor dan sekitarnya. Data selengkapnya mengenai perbandingan jumlah armada kapal perikanan Pelabuhan perikanan Pantai Mayangan tahun 2011-2014 ditampilkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Jumlah Armada Kapal Perikanan PPP Mayangan Tahun 2011-2014

Ukuran	Jumlah Kapal pada tahun 2011	Jumlah kapal pada tahun 2012	Jumlah kapal pada tahun 2013	Jumlah kapal pada tahun 2014
< 10 GT	78	77	52	39
11-20 GT	43	79	124	72
21-30 GT	65	102	87	118
31-50 GT	39	77	81	115
51-100 GT	8	17	16	25
>100 GT	2	6	9	10

Sumber: Syahbandar PPP Mayangan (2014)

Dari Tabel perbandingan diatas, terlihat bahwa peningkatan armada menjadi kapal berukuran diatas 20 GT, sedangkan armada berukuran dibawah 20 GT justru mengalami penurunan kuantitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas nelayan dan pengusaha penangkapan ikan di wilayah Pelabuhan Perikanan Mayangan cenderung untuk mengubah armada kapal penangkap ikannya menjadi kapal yang berukuran lebih besar, sehingga beresiko untuk menyebabkan terjadinya *overfishing* di kawasan Selat Madura, Laut Jawa dan perairan disekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan langkah menjaga keberlanjutan Sumber Daya Ikan di kawasan perairan Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Data selengkapnya mengenai perbandingan jumlah alat tangkap ikan Pelabuhan Perikanan Mayangan tahun 2011-2014 ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Jumlah Alat Tangkap Ikan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan 2011 – 2014

Alat Tangkap	2011	2012	2013	2014
Bouke Ami	0	1	2	4
Bubu	8	3	3	4
Cantrang	119	155	174	127
Gill Net	8	15	18	31
Muro Ami	0	1	0	0
Pancing Cumi	0	1	0	0
Payang	24	17	9	14
Purse Seine	17	60	61	54
Pancing Rawai	49	93	86	130
Pengangkut	10	12	16	15

Sumber : Data Syahbandar PPP Mayangan (2014)

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa peningkatan terjadi pada alat tangkap jenis cantrang, *gill net*, *purse seine* serta kapal pengangkut, untuk alat tangkap jenis lain cenderung mengalami penurunan jumlah.

Jika diamati peningkatan terbesar terjadi pada alat tangkap cantrang, hal tersebut mengondikasikan bahwa alat tangkap tersebut sangat diminati oleh pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Probolinggo, sehingga beresiko untuk menyebabkan terjadinya *overfishing* di kawasan Selat Madura dan Laut Jawa. Untuk itu perlu dilakukan langkah yang tepat guna mengantisipasi terjadinya hal tersebut.

4.4.4 Produksi dan Nilai Produksi Ikan

Total produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan sepanjang tahun 2011 adalah sebesar 11.411.227 Kg, jumlah tersebut terdiri dari hasil tangkapan kapal dengan jenis alat tangkap rawai dasar 4.881.026 Kg (42,77 % dari total hasil tangkapan), cantrang 3.844.823 Kg (33,70%), *purse seine* 2.563.061 Kg (22,46%) dan bubu 122.320 Kg (1,07%). Jenis ikan yang ditangkap bervariasi tergantung jenis alat tangkap dan wilayah operasional penangkapan.

Produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPP Mayangan dirangkum berdasarkan data laporan monitoring Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dengan mengacu pada data produksi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan. Total produksi ikan yang didaratkan di PPP Mayangan sepanjang tahun 2012 adalah sebesar 9.505.906 Kg, jumlah ini turun 16,70 % dari produksi tahun 2011 yang sebesar 11.411.227 Kg. Akan tetapi dari hasil perhitungan estimasi, nilai produksi yang didaratkan tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,44 %, pada tahun 2011 senilai Rp. 145.131.000.100,00 menjadi Rp. 166.084.886.300,00.

Fluktuasi hasil tangkapan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kapal-kapal berukuran diatas 31 GT, karena meskipun jumlahnya sedikit (kapal $\leq$ 30 GT sebanyak 258 unit dan kapal $>$ 30 GT hanya 100 unit) namun data produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan Mayangan Kota Probolinggo sepanjang tahun 2013 mencapai 12.698.417 Kg, angka ini jauh diatas hasil produksi tahun 2012 yang hanya sekitar 9.500 ton atau meningkat sebesar 33,58 %.

Data produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan Mayangan Kota Probolinggo sepanjang tahun 2014 mencapai 14.469.226 Kg, angka ini diatas hasil produksi tahun 2013 yang hanya sekitar 12.600 ton atau meningkat sebesar 13,95 %. Jika di tahun 2013 hanya berkisar di nilai 225 milyar rupiah maka nilai produksi tahun 2014 menembus angka 289 milyar rupiah dengan kenaikan mencapai 28,5 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Jumlah Hasil Produksi Tangkapan Ikan PPP Mayangan Tahun 2011-2014

Bulan	2011	2012	2013	2014
Januari	733.456	904.360	1.138.611	1.420.964
Februari	667.441	926.181	1.062.177	1.173.077
Maret	689.944	869.495	1.477.992	1.222.212
April	497.120	989.905	1.372.253	1.476.638
Mei	1.693.594	933.616	1.202.689	1.811.014
Juni	1.321.344	656.504	1.160.703	1.438.404
Juli	1.089.107	478.412	816.894	1.300.731
Agustus	488.278	442.398	409.923	627.831
September	517.797	503.213	557.630	682.339
Oktober	603.474	677.351	647.864	326.390
November	1.023.185	862.354	1.008.323	1.161.130
Desember	1.086.487	1.262.117	1.843.358	1.828.497
Total	11.411.227	9.505.906	12.698.417	14.469.226

Sumber: UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo, 2014

Berdasarkan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, diperoleh beberapa jenis ikan yang masuk kedalam komoditi ekspor hasil perikanan yaitu ikan kerapu, kakap merah, bawal, layur, teri, pari, mackerel dan tengiri. Beberapa jenis ikan yang tidak termasuk komoditi ekspor merupakan jenis ikan palagis yang memiliki nilai ekonomis (daftar jenis ikan dan volume hasil tangkapan dapat dilihat pada Tabel 15).

Tabel 15. Jenis dan Jumlah Ikan Yang Didaratkan di PPP Mayangan Tahun 2014

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan		Harga Rata-Rata (Rp/Kg)
		Volume Produksi (Kg)	Nilai (Rp)	
1	Cucut Hiu	113 Kg	904.000	8.000
2	Pari (Pare) Kembang	280 Kg	3.920.000	14.000
3	Pinjalo	110.500 Kg	2.431.000.000	22.000
4	Kuniran	885 Kg	6.195.000	7.000
5	Beloso	32.878 Kg	246.585.000	7.500
6	Kurisi	12.153 Kg	121.530.000	10.000
7	Swanggi	7.142 Kg	64.278.000	9.000
8	Ikan Sebelah	124 Kg	1.488.000	12.000
9	Golok-Golok	540 Kg	8.100.000	15.000
10	Layur	156 Kg	2.184.000	14.000
11	Kapas-kapas	572 Kg	3.432.000	6.000
12	Kwee	15.240 Kg	304.800.000	20.000
13	Gulamah	268 Kg	1.876.000	7.000
14	Teri	94 Kg	940.000	10.000
15	Selar Kuning	1.378 Kg	11.024.000	8.000
16	Aruan Tasek, Cobia	43.200 Kg	324.000.000	7.500
17	Gerot-gerot	288 Kg	3.456.000	12.000
18	Remang	23 Kg	230.000	10.000
19	Layang Benggol	56.824 Kg	852.360.000	15.000
20	Tembang	125 Kg	1.500.000	12.000
21	Tembang	2.129 Kg	25.548.000	12.000
22	Bawal Hitam	63 Kg	2.205.000	35.000
23	Peperek	16.948 Kg	33.896.000	2.000
24	Bulu Ayam	145 Kg	362.500	2.500
25	Manyung	42.179 Kg	316.342.500	7.500
26	Jenaha	206 Kg	5.150.000	25.000
27	Kakap Merah	10 Kg	400.000	40.000
28	Alu-alu	525 Kg	6.562.500	12.500
29	Kerapu Kerang	7.000 Kg	252.000.000	36.000
30	Ketang-ketang	83 Kg	664.000	8.000
31	Ikan Merah	25.200 Kg	1.008.000.000	40.000
32	Pinjalu	42.500 Kg	935.000.000	22.000
33	Kerapu Lumpur	25 Kg	900.000	36.000
34	Kerapu Karang	10.800 Kg	388.800.000	36.000
35	Rajungan	35 Kg	192.500	5.500

36	Cumi-cumi	246 Kg	9.225.000	37.500
37	Buntal	928 Kg	3.248.000	3.500
38	Tongkol Sirana	501 Kg	10.020.000	20.000
39	Tenggiri Papan/Mackerel	159.313 Kg	3.026.947.000	19.000
40	Udang Dogol	84 Kg	3.108.000	37.000
41	Lemuru	2.518 Kg	30.216.000	12.000
Jumlah Total		594.221 Kg	19.448.589.000	

Sumber: data statistik PPP Mayangan (2014)

4.5 Sosial Masyarakat Nelayan Desa Mayangan

4.5.1 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Pada umumnya masyarakat pesisir memiliki karakter yang sangat keras, karena dipengaruhi oleh faktor geografis daerah, tak terkecuali pada masyarakat Nelayan pesisir yang berada di Desa Mayangan yang memiliki karakter yang keras, terbuka, loyal, dermawan, dan gaya hidup mewah. Karakter keras dan suaranya lantang, karena masyarakat nelayan Desa Mayangan kehidupannya dilaut untuk mencari mata pencaharian yang membutuhkan nyali atau keberanian yang tinggi dalam melakukan operasi penangkapan ikan dilaut, dan memiliki suara lantang, karena nelayan terbiasa hidup dilaut dengan cuaca atau musim yang tak menentu, dan didalam perahu, nelayan hanya mendengarkan suara mesin dan angin yang ada dilaut saat para nelayan berangkat melaut, sehingga para nelayan memiliki suara yang khas yaitu lantang keras, karena didalam perahu saat melakukan operasi penangkapan ikan, nelayan terganggu oleh suara mesin perahu yang keras dan angin laut kencang, sehingga nelayan saat melakukan operasi penangkapan ikan atau sedang melaut berbicaranya lantang dan keras, supaya terdengar oleh nelayan yang lain saat melakukan operasi penangkapan ikan atau sedang melaut. Untuk karakter masyarakat nelayan Desa Mayangan yang kedua yaitu mempunyai karakter atau sifat yang terbuka, yang dimaksud terbuka yaitu masyarakat nelayan yang mau menerima masukan dari teman nelayan lain, misal

dalam hal pembuatan perahu yang membutuhkan perbandingan dalam membuat perahu dan terbuka dalam menunjukkan tempat atau daerah penangkapan ikan yang banyak terdapat ikan, perbincangan para nelayan biasanya dilakukan di sangar atau tempat berteduh yang berada tidak jauh dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang masih dalam kawasan PPP Mayangan dan warung-warung kopi yang ada di kawasan pelabuhan Mayangan dan sekitarnya. Sedangkan karakter yang ketiga adalah loyal, masyarakat nelayan Desa Mayangan terkenal dengan karakter atau sifat yang loyal dalam pertemanan, sehingga masyarakat nelayan Mayangan banyak dijumpai pada saat tidak melakukan aktivitas melaut, masyarakat nelayan Mayangan berkumpul dengan temannya seperti di warung kopi secara bersama-sama, dan jarang sekali pertemanan para nelayan di Desa Mayangan terjadi perselihan atau ketegangan sesama temannya. Karakter atau sifat yang keempat dimiliki masyarakat nelayan Desa Mayangan yaitu memiliki sifat dermawan dalam memberikan sumbangan, seperti memberikan sumbangan pada saat acara petik laut yang dilaksanakan nelayan Mayangan, sumbangan gerak jalan dan karnaval yang diadakan dalam memperingati HUT RI, dan memberikan sumbangan-sumbangan yang lain. Untuk karakter atau sifat yang terakhir yang dimiliki oleh masyarakat nelayan Desa Mayangan yaitu memiliki karakter atau sifat gaya hidup mewah dalam membeli barang atau produk yang terpenting adalah kualitas dan mutunya, sehingga banyak sekali masyarakat istri nelayan atau perempuan di Desa Mayangan sebagian besar menggunakan perhiasan emas dan kebanyakan dari mereka menyisahkan uang hasil melaut untuk membeli kendaraan atau sepeda motor dengan kredit.

Masyarakat pesisir memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan lahan untuk mencari mata pencahariaan dalam melaut, dan jam kerja yang tidak menentu tergantung dari jumlah ikan yang didapat pada saat melaut dan teknologi yang digunakan pada saat melakukan operasi penangkapan ikan dilaut. Pada nelayan di Desa Mayangan, perahu yang digunakan berukuran 11-20 GT, biasanya pada satu bulan bisa melaut (*trip*) 2-3 kali, lama melaut biasanya berkisar 1-3 hari, tergantung jumlah ikan yang diperoleh. Sedangkan pada perahu yang berukuran 21-30 GT, biasanya dalam satu bulan bisa melaut (*trip*) 2 kali saja, untuk lama melaut biasanya berkisar antara 12-15 hari tergantung perolehan ikan yang didapatkan oleh nelayan pada saat melaut atau melakukan operasi penangkapan ikan. Sedangkan untuk daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di Desa Mayangan biasanya dilakukan penangkapan ikan di wilayah operasional di sekitar Selat Madura dan Laut Jawa. Hasil tangkapan dari nelayan di Desa Mayangan diantaranya jenis ikan alu-alu, ikan kurisi, ikan kuniran, ikan peperek, ikan bloso, ikan kerong-kerong, ikan layur, ikan pari, ikan manyung, ikan swangi, dll. Semua ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Mayangan didaratkan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pelabuhan Perikanan (PP) Mayangan.

4.5.2 Struktur Masyarakat Nelayan Desa Mayangan

Pada masyarakat pesisir, struktur masyarakat dalam kaitannya dengan perekonomian dibedakan berdasarkan penguasaan alat produksi, tingkat skala investasi modal usahanya dan pola hubungan kerja (Kusnadi, 2002). Di perairan Mayangan, nelayan berdasarkan penguasaan alat-alat produksi terdiri dari pemilik perahu (juragan darat) dan nelayan buruh atau biasa disebut ABK (Anak Buah Kapal). ABK merupakan sekelompok orang yang melakukan operasi penangkapan ikan dengan keahliannya masing-masing.

Berdasarkan tingkat investasi modal usahanya terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar yaitu nelayan yang mempunyai modal dalam usahanya relatif besar. Biasanya nelayan besar tidak ikut melaut, mereka hanya menyediakan kebutuhan yang diperlukan untuk melaut dalam bentuk uang tanpa harus terjun langsung dalam penangkapan. Sedangkan nelayan kecil adalah nelayan yang memiliki perahu dan mempunyai modal relatif sedikit, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan melaut/operasi penangkapan ditangani sendiri. Pada lokasi penelitian di daerah Mayangan, pemilik modal sebagian besar dilakukan oleh pengambang. Pengambang disini merupakan orang yang mengurus datangnya perahu ke pelabuhan dalam hal mencatat hasil produksi di TPI.

4.5.3 Stratifikasi (kelas) Sosial

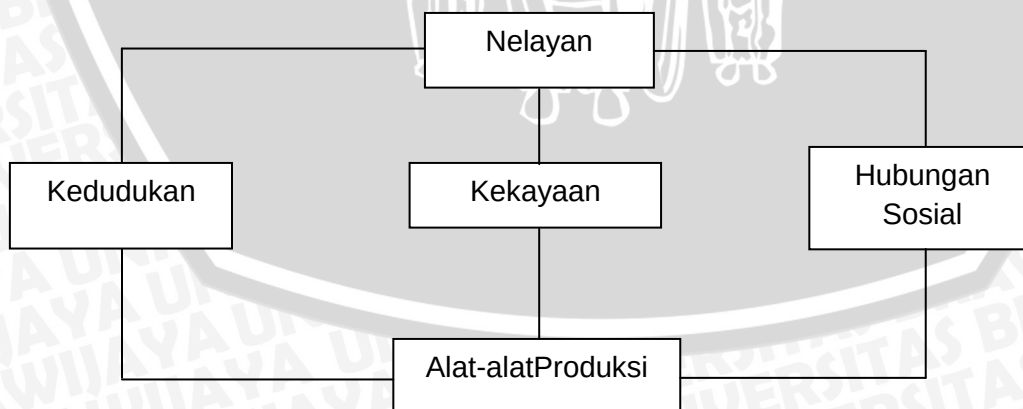
Bentuk stratifikasi sosial yang terpelihara dan berlaku pada rumah tangga masyarakat pesisir, serta bagaimana stratifikasi sosial tersebut berfungsi sebagai salah satu strategi adaptasi dalam konteks mengatasi kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan faktor untuk dapat memahami kehidupan masyarakat nelayan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga nelayan buruh tergolong kelompok sosial yang rentan dari tekanan ekonomi. Ketidakpastian perolehan pendapatan dan rendahnya tingkat penghasilan rumah tangga dari aktifitas melaut menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial di masyarakat nelayan.

Seperti yang di ungkapkan oleh pak SLH :

“Hasil tangkapan ikan kalau sedikit ya kita hanya mengandalkan dari uang sampingan *“nduk-ghinduk”* saja mbak, dan kalau hasilnya sekali trip sedikit, itu sangat merugikan kita karena juga ikut menanggung modal dengan membayar dari hasil tangkapan selanjutnya”.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir, yang membedakan adalah tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat pesisir, sehingga membentuk perbedaan masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Perbedaan stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir yaitu perbedaan kelas-kelas sosial atau perbedaan tingkatan, sehingga ada yang kelas tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu yang membedakan adalah kedudukan, di mana dalam masyarakat pesisir kedudukan yang paling tinggi adalah pemilik perahu atau juragan perahu, sedangkan kedudukan yang paling rendah adalah kedudukan nelayan atau ABK (anak buah kapal), dari stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir yang paling penting adalah hubungan sosial antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan nelayan ABK (Anak Buah Kapal), sehingga tidak ada strata dari hubungan sosial keduanya yang diakibatkan oleh perbedaan kelas maupun perbedaan kedudukan.

Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan yang membedakan adalah dari segi kedudukan, kekayaan, dan yang paling penting adalah terjadinya hubungan sosial yang baik antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan nelayan ABK (anak buah kapal). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Stratifikasi (Kelas) Sosial Nelayan di Mayangan

Stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Mayangan dapat dihasilkan beberapa konstruksi stratifikasi sebagai berikut:

- a. Segi kedudukan, pada nelayan lokal terbagi atas pemilik perahu atau juragan perahu dan ABK (Anak Buah Kapal). Dimana ABK (Anak Buah Kapal) atau terdiri dari juru mesin, juru mudi, juru masak, penarik jangkar atau pemberat, tukang lampu, penarik jaring cantrang. Dari golongan ABK (anak buah kapal) yang memimpin langsung dalam melakukan operasi penangkapan ikan adalah pemilik perahu atau juragan perahu, sehingga dalam segi kedudukan yang paling tinggi dari ABK (anak buah kapal) adalah kedudukan pemilik perahu atau juragan perahu. Karena pemilik perahu atau juragan perahu sebagai pemilik modal usaha dan alat-alat produksi dalam melakukan operasi penangkapan ikan (perahu, mesin, jaring, dan perlengkapan yang lain), sedangkan ABK (Anak Buah Kapal) hanya sebagai pekerja untuk melakukan penangkapan ikan.
- b. Segi kekayaan, pemilik perahu atau juragan perahu pendapatannya lebih tinggi dari pada ABK (anak buah kapal). Hal ini disebabkan, karena pemilik perahu atau juragan perahu yang memiliki modal usaha dan alat-alat produksi (perahu, mesin, jaring payang, dan perlengkapan yang lain) dalam melakukan usaha penangkapan ikan, sehingga dalam pembagian hasil yang diterima pemilik perahu atau juragan perahu lebih besar dari pada ABK (Anak Buah Kapal) dan Nahkodanya.
- c. Segi hubungan sosial, yang terjadi pada masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan tidak ada strata dari hubungan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan kelas antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK (Anak Buah Kapal), sehingga hubungan sosial keduanya terjalin dengan baik dan melakukan kerjasama dalam usaha penangkapan ikan.

4.6 Potensi Dan Pereda Konflik Dari Sistem Bagi Hasil Nelayan Lokal

4.6.1 Potensi Konflik dari Sistem Bagi Hasil Nelayan Lokal

Secara umum pemilik perahu atau juragan darat di Desa Mayangan Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo khususnya pada nelayan lokal membebankan biaya operasional seperti terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaring, kepada ABK dengan cara ditanggung bersama-sama. Akibatnya terdapat dua pandangan yang berbeda, dari pihak pemilik perahu atau juragan perahu merasa bahwa membebankan biaya operasional seperti terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaring kepada ABK cukup adil, mengingat bahwa modal investasi untuk pemilihan alat tangkap cukup besar, disamping itu pihak nelayan ABK telah diuntungkan dari pendapatan uang lawuhan atau "*nguk-ghinduk*" yang diperoleh dari kegiatan operasi penangkapan ikan yang diuangkan pada saat pembongkaran ikan di TPI (tempat pelelangan ikan). Kemudian dari pihak ABK merasa bahwa aturan yang dibuat oleh pemilik perahu atau juragan perahu tidak adil, karena biaya operasional seperti terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaring, ABK ikut menanggung, karena mereka beranggapan bahwa pada saat mereka melakukan operasi penangkapan ikan atau melaut, mereka mempertaruhkan nyawanya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh DRHMN:

"Ya kalo uang untuk makan sehari-hari kalo lagi gak melaut, kita selain mendapatkan uang dari *nduk-ghinduk* dari juragan kita juga dapat *wesewe*, tapi kita tidak terlalu banyak dalam mengambil *wesewe*, kita juga melihat kondisi hasil tangkapan juga. kalo hasil tangkapan banyak kita mengambil *wesewe* lumayan banyak, tapi kalo tangkapan sedikit, apa yang mau diambil palingan juga dapat *nduk-ghinduk* dari juragan darat ya di cukup-cukupin ajalah mbak..."

Walaupun ada sedikit penyimpangan dalam sistem bagi hasil, namun kelembagaan ini tetap ada dan menjadi kesepakatan yang tidak pernah muncul konflik secara terbuka. Tidak ada perselisihan secara terbuka dan keributan yang

nyata terjadi. Tetapi hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketegangan di antara komunitas nelayan. Berkaitan dengan *wesewe*, misalnya juragan menuding juru mudi atau “*tekong*” dan ABK memanfaatkan kesempatan, keterlaluan dan tidak mau tahu besarnya beban yang harus ditanggung oleh juragan perahu.

4.6.2 Pereda Konflik Sistem Bagi Hasil Nelayan Lokal

Sistem bagi hasil khususnya nelayandi Desa Mayangan merupakan potensi konflik yang berkepanjangan tetapi semu, yang disebabkan oleh pandangan berbeda antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK, akibat dari pemilik perahu atau juragan perahu membebankan biaya operasional seperti terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaring kepada ABK dengan cara ditanggung bersama-sama. Itu bukan tanggung jawab ABK karena pada saat mereka melakukan operasi penangkapan ikan atau melaut, mereka mempertaruhkan nyawanya.

Menurut pak SLH:

“Sistem pembagian hasil disini menurut saya sudah bagus mbak, walaupun kita juga menanggung biaya melaut tapi masih wajar aja, yang penting kita orang bisa makan dan punya penghasilan. Kita juga nggak dapat berbuat apa-apa karena kita juga perlu sama juragan darat, kita tidak punya modal untuk membeli perahu atau untuk biaya operasional ke laut. Gitu pula juragan darat membutuhkan kita untuk usaha penangkapan jadi ya sama-sama saling membutuhkan lah mbak. Selain itu, saya senang menjadi nelayan dari dulu walaupun nyawa taruhannya...”

Menurut yang di ungkapkan oleh DRHMN:

“nggak pernah ada konflik kok mbak, palingan biasanya cuman salah paham antara nelayan kalo gurau berlebihan tapi nggak yang berkepanjangan. Untungnya selama saya jadi nelayan disini hubungan dengan juragan perahu (pemilik perahu) dan temen kerja sesama ABK baik-baik saja, alhamdulillah mbak...”

Namun pada akhirnya para ABK memberikan kontribusi untuk menuruti apa kata juragan perahu yang mempunyai wewenang untuk memerintah para ABK

melakukan apapun karena jika para ABK tidak melakukan yang mereka mau bisa saja para ABK dikeluarkan dari pekerjaan tersebut dan otomatis mereka menganggur dan tidak mempunyai pendapatan.

Harapannya apabila ada Investor yang datang ke daerah Mayangan akan membantu masalah para ABK dengan juragan perahu. Jika ABK tidak menuruti apa kata juragan mereka tidak akan takut untuk dikeluarkan dari pekerjaan mereka, karena mereka berfikir dengan adanya Investor bisa menolong para ABK untuk bekerja kepada Investor tersebut.

Namun, hal ini dalam konflik yang disebabkan oleh biaya operasional yang ditanggung bersama-sama antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK harus diperhatikan secara benar, sehingga tidak menyebabkan konflik antar keduanya. Disini terlihat bahwa nelayan ABK mengandalkan besarnya hasil tangkapan yang diperoleh dalam sistem bagi hasil, sehingga nelayan ABK menyadari bahwa sistem bagi hasil sudah cukup adil bagi mereka. Karena pemilik perahu atau juragan perahu memberikan lawuhan atau "*nduk-ghinduk*" dari hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh pada saat melaut. Dan lawuhan tersebut bisa dijual pada bakul ikan di sekitar TPI (tempat pelelangan ikan) Mayangan, sehingga nelayan ABK memperoleh pendapatan tambahan. Selain itu, nelayan ABK menyadari bahwa modal usaha untuk melakukan penangkapan ikan membutuhkan biaya yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan atau pendapat dari pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK dalam sistem bagi hasil, sampai sekarang tidak ada konflik antara keduanya, karena mereka merasa saling ketergantungan satu sama lain dalam menjalankan usaha penangkapan ikan agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang maksimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Sistem Bagi Hasil Dan Stratifikasi Sosial Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal dan Nelayan Andon di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan di Desa Mayangan

Bagi hasil pada usaha penangkapan ikan antara nelayan andon dan nelayan lokal di Desa Mayangan perbedaannya adalah pada nelayan lokal umumnya menggunakan persentase sedangkan pada nelayan andon menggunakan bagian. Kemudian pada pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional, retribusi TPI (tempat pelelangan ikan), biaya manol, penjual ikan, dan biaya yang lainnya yang disebut *totalan*.

2. Perkembangan Usaha Penangkapan di Desa Mayangan

Perkembangan usaha penangkapan ikan setelah kedatangan nelayan adon di Mayangan dengan subyek yang meliputi nelayan lokal dan nelayan andon. Di mana profesi kedua nelayan ini sebagai penangkap ikan dengan menggunakan instrument (peralatan) atau jenis alat tangkap yang hampir sama. Usaha penangkapan ini semakin meningkat dan menyebabkan beragamnya kegiatan perekonomian di kawasan Mayangan.

3. Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Mayangan

a. Perilaku masyarakat pesisir

Masyarakat nelayan di Desa Mayangan khususnya nelayan lokal, memiliki karakter yang keras, terbuka, loyal, dermawan, dan gaya hidup mewah.

b. Stratifikasi sosial

Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan yang membedakan adalah dari segi kedudukan, kekayaan, dan yang paling penting adalah terjadinya hubungan sosial yang baik antara pemilik perahu atau juragan perahu dengan juru mudi atau "*tekong*" dan nelayan ABK (anak buah kapal) atau nelayan buruh.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yaitu:

1. Perlu adanya informasi kepada investor dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Mayangan
2. Perlu adanya peningkatan sumberdaya manusia dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan
3. Perlu adanya pengkajian Undang-Undang tentang Sistem Bagi Hasil nelayan oleh pemerintah karena Undang-Undang tersebut pada kenyataannya tidak dapat diterapkan oleh masyarakat nelayan, karena Undang-Undang yang ada masih belum bisa menciptakan keadilan bagi nelayan.

4. Perlu adanya pengawasan dalam meng awal hasil tangkapan nelayan pada saat pembongkaran ikan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), supaya tidak terjadi pengambilan ikan secara berlebihan.

The logo of Universitas Brawijaya is a large, light gray shield shape. Inside the shield, the text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" is written in a bold, white, sans-serif font, following the upper curve of the shield. Below the text is a white line-art illustration of a central figure, likely a deity or historical figure, seated and holding multiple objects in their hands. Two smaller figures stand on either side of the central figure. The entire logo is centered on the page.

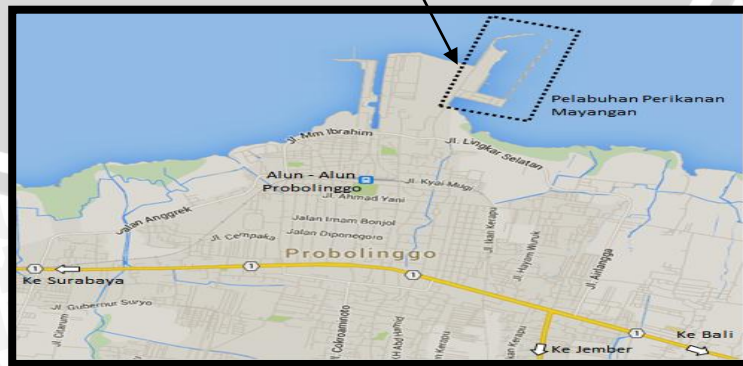
DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, P. 2010. **Definisi Nelayan**.<http://www.rudycct.com/PPS702ipb/09145/pathul-arifin.pdf>. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Agusta, ferry.2009.<http://ferragusta.wordpress.com/2009/12/04/konflik-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-laut-kasus-nelayan-di-perairan-utara-jawa-timur/html>. Diakses tanggal 23 Juni 2014
- Bariyah Khoirotul, 2004. **Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Pola Bagi Hasil Penangkapan Ikan Guna Mencapai Kesejahteraan Sosial Ekonomi (Studi Kapal Motor Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Budi, Siswanto Dr. 2009. Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan. Laksbang Mediatama. Surabaya
- DKP, 1988. **Nelayan Andon**.<http://www.borneotribune.com/sambas/dkp-berikan-ktp-nelayan-andon.html>. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Dirjen Perikanan Tangkap. 2002. **Info Aktual: Perikanan Tangkap Indonesia**. Dinas Kelautan dan Perikanan RI.www.dkp.go.id. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Faisal, S. 1989. **Dasar dan teknik Menyusun Angket. Usaha Nasional**. Surabaya
- Fanni Ahmad, 2013. **Pembagian Kerja Dan Sistem Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo**. Skripsi Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Jember. Jember.
- Harahap, Nuddin, 1993. **Kekuatan Tradisi dalam Sistem Bagi Hasil dan Analisis Profitabilitas Usaha Penangkapan Ikan di JawaTimur**, The Toyota Foundation. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Hikmah, zainatul, 2008. **Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura Perspektif Sosiologis-Hukum**. Lembaga Penelitian IPB : Bogor. Diakses tanggal 23 Juni 2014
- Ismadi, 2009. **Migrasi Nelayan Andon Pantai Utara Ke Selatan, Jawa Timur Proses dan Dampak Sosial Budaya di Daerah Tujuan**. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Kusnadi, 2000. **Nelayan (Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial)**. Humaniora Utama Press. Bandung
- Kusnadi, 2002. **Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam)**. Penerbit LKIS. Yogyakarta.

- Kusnadi, 2003. **Akar Kemiskinan Nelayan**. Penerbit LKIS. Yogyakarta.
- Laila M. R, 2010. **Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal dan Nelayan Andon Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur**. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Lestari D, 2010. **Migrasi Nelayan Andon Pantai Utara Ke Selatan, Jawa Timur Proses dan Dampak Sosial Budaya di Daerah Tujuan**. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Murniatmo, G. Dan H. J. Wibowo. 1983. **Sistem Pelapisan Sosial Dalam Komunitas Orang Madura di Sumenep**. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal
- Moleong Lexy J, 2013. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nazir, M. 2003. **Metode Penelitian**. Ghaliah Indonesia. Jakarta
- PBB, 1982. **Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal dan Nelayan Andon Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur**. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Pramono Djoko, 2005. **Budaya Bahari**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Priananta E. Y, 2008. **Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Purse Sein Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang.
- Primyastanto, 2013. Bab II Kajian Pustaka -30-12-13-2-
rev3. <http://www.pdf.mimitprimyastanto.lecture.ub.ac.id/2013/universitas/brawijaya/malang.html>. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Retnowati Endang, 2011. **Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)**. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jurnal Hukum Vol. XVI. Tahun 2011. Hal 153-157.
- Schoorl, J. W., 1981. **Modernisasi (Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang)**. Diindonesiakan oleh R. G. Soekadijo. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta
- Suryabrata, S. 2011. **Metodologi Penelitian**. CV. Rajawali.

- Sudaryanto, 2009. **Praktik Bagi Hasil Perikanan Di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah.** volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 – 628. Diakses tanggal 22 Juni 2014
- Soekanto, 1987. **Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal dan Nelayan Andon Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.** Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Soekanto, 1988. **Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal dan Nelayan Andon Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.** Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Solohin, Akhmad. 2008. <http://ikanbijak.wordpress.com/2008/03/18/aspek-hukum-sistem-bagi-hasil-perikanan-dalam-rangka-menciptakan-keadilan/html>. Diakses tanggal 23 Juni 2014
- Sugiyono, 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.** Penerbit Alfabeta. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang **Bagi Hasil Perikanan**. www.dkp.go.id. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. **Pengertian Nelayan.** www.dkp.go.id. Diakses tanggal 2 Maret 2014
- Umar Husein, 1997. **Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran.** Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibisono Wiyono, 2005. **Peran dan Strategi Koperasi Perikanan dalam Menghadapi Tantangan Pengembangan TPI dan PPI Di Indonesia Terutama Di Pulau Jawa.** Makalah dalam Semiloka Internasional Itentang Revitalisasi Dinamis Pelabuhan Perikanan dan Perikanan Tangkap Di Pulau Jawa dalam Pembangunan Perikanan Indonesia, Bogor.
- Yin, Robert K. 2002. **Studi Kasus Desain Dan Metode.** PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Lampiran 1. Lokasi Penelitian Kota Probolinggo



[illegible]

Sumber: UPT Pelabuhan Perikanan Pantai(PPP) Mayangan Kota Probolinggo, 2014

Lampiran 3. Gambar Penelitian



Gambar 1. Perahu Nelayan Lokal



Gambar 2. Perahu Nelayan Andon



Gambar 3. Jaring Nelayan Lokal



Gambar 4. Jaring Nelayan Andon



Gambar 5. Tali Nelayan Lokal



Gambar 6. Tali Nelayan Andon



Gambar 7. Perbaikan Jaring “nelayan lokal” Gambar 8. Tempat Memperbaiki Jaring



Gambar 9. Wawancara dengan Nelayan Lokal



Gambar 10. Wawancara dengan Nelayan Andon Gambar 11. ABK membawa “wesewe”



Gambar 12. Pengambak Mencatat Hasil



Gambar 13. Wawancara dengan Kepala Syahbandar Kantor Pelabuhan Perikanan (PP) Mayangan



Gambar 14. Pendaratan Ikan



Gambar 15. Manol



Gambar 16. Pengisi Perahu



Gambar 17. Ikan Hasil Tangkapan



Gambar 18. Rumah Juragan Perahu



Gambar 19. Rumah ABK



Gambar 20. Pasar Ikan Mayangan



Gambar 21. Pabrik Es



Gambar 22. ABK lagi Istirahat



Gambar 23. Tempat Penyimpanan Ikan Selama Melaut